



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KEPALA BSN, KETUA KPPU,
KEPALA BP BATAM, KEPALA BPKS SABANG**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 7 (Tujuh)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 2 September 2024
Waktu : Pukul 14.31 s.d. 17.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Mohamad Hekal
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P.Gerindra)
- Acara : Pembahasan terkait:
1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 (Pagu Anggaran)
 2. Pelaksanaan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024
 3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
25 dari 54 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP)**

5 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Sonny T. Danaparamita
4. Sondang Tiar Debora Tampubolon
5. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-PG)**

6 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.

2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena
4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
5. Doni Akbar, S.E., M.M.
6. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)

3 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. Andre Rosiade
3. Ir. La Tinro La Tunrung

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
3. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

1 dari 6 orang Anggota

1. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim, SHI., M.M
3. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

1 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

4. Dr. Jon Erizal, S.E., MBA.
5. Abdul Hakim Bafagih
6. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN:

1. Kepala Badan Standarisasi Nasional (Kukuh

- S. Achmad) beserta jajaran
2. Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (M. Fanshurullah Asa) beserta jajaran
 3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Purwiyanto) beserta jajaran
 4. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Iskandar Zulkarnaen) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, kita mulai ya.

Bisa kaliitan kan antusiasme dari Anggota, sore-sore begini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Yang saya hormati Pimpinan, dan Anggota Komisi VI, dan Selamat datang kepada Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Kukuh, beserta jajarannya, Kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Fansahrullah, beserta jajarannya, dan Teman-teman Anggota KPPU, Wakil Ketua Badan Pegusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bapak Purwianto, beserta jajarannya, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Bapak Iskandar Zulkarnain, beserta jajarannya,

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa taala*, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan rapat dengar pendapat pada hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sesuai dengan laporan dari Sekretariat Komisi VI, rapat hari ini telah ditandatangani oleh 19 orang, dengan izin 6 orang, namun sudah mewakili 8 fraksi, sehingga kuorum fraksi telah tercapai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Pasal 281 dan 271 ayat (1), ayat (1). Maka, dengan ini perkenankan saya membuka rapat ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju ya.

**(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.31 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**



Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala BSN, kepada Ketua KPPU, Wakil Kepala BP Batam, saya singkat saja, dan kepada Kepala BPKS Sabang atas kesediaan waktunya hari ini untuk membahas RKA K/L Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan anggaran sampai 2 Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain.

Untuk itu, rapat kita sepakati dulu, kita akhiri pada pukul 4 ya, *oke Insyaallah*, 4.

(RAPAT : SETUJU)

Sebelum kita mulai acara, kita juga ingin menyampaikan berita duka cita. *Innalilahi wa innalilahi rojiun*, telah berpulang ke rahmatullah, kerabat, rekan kita di Anggota Komisi VI DPR RI, yaitu: Datuk Drs. Nyat Kadir, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, pada hari Minggu, 1 September 2024 di Rumah Sakit Pondok Indah, di Jakarta pada pukul 14.17. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dimaafkan segala salah dan khilafnya, dilapangkan dan diterangkan kuburnya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan ketabahan. Aamiin, Al-Fatihah.

Aamiin.

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami muliakan,

Dapat kami sampaikan, berdasarkan nota keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, terdapat pagu anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebesar Rp223.867.121.000,00
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp105.363.198.000,00
3. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP Batam) sebesar Rp1.996.858.000.000,00
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) sebesar Rp53.494.482.000,00

Adapun, Pagu Anggaran untuk BSN, KPPU dan BPKS Sabang dan BP Batam, maaf, dan BPKS Sabang, tidak mengalami perubahan dengan pagu indikatif tahun 2025 yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat dengar pendapat tanggal 10 Juni 2024 lalu dan hanya BP Batam yang mengalami sedihnya ini, penurunan ini, sebesar Rp75.648.461.000,00 dari pagu indikatif tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp2.062.506.661.000,00.

Selain pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2025, pada rapat dengar pendapat tahun ini, Komisi VI juga ingin mengetahui realisasi anggaran BSN, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024.



Untuk itu, Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan BSN, KPPU, BP Batam dan BPKS, BPKS, BPK Sabang terkait RKP, RKA K/L pada hari ini diharapkan bisa, terdapat gambaran perkembangan program, termasuk kendala dihadapi, solusi yang diharapkan dan dukungan politik yang diperlukan dari Komisi VI. Dan terkait hal tersebut, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan terhadap pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2025 dan pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Kami persilakan untuk menyampaikan terlebih dahulu dari Kepala BSN, silakan Pak Kukuh.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO KURNIAWAN, M.Si., M.M.):

Izin, Pimpinan.

Ini karena mitranya ada 4 dan angkanya kan sudah pernah dibahas, mungkin lebih singkat, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kenapa? Oh, ya.

KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

**Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan Komisi VI DPR RI, dan
Yang saya hormat Bapak Ketua KPPU,
Bapak Pimpinan BP Batam,
Bapak BPKS Sabang, serta
Bapak-Ibu yang hadir sekalian pada acara rapat dengar pendapat siang
hari ini,**

Pertama, *alhamdulillahirabbil alamin*. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa taala*, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan BSN, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang untuk melakukan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran K/L Tahun Anggaran 2025 dan Pelaksanaan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Bapak, Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.

Kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja KL Tahun Anggaran 2025, BSN memperoleh pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp223.867.121.000,00. Pada dasarnya anggaran tersebut sama dengan pagu indikatif BSN, tidak ada perubahan. Pada anggaran tersebut bisa dirinci berdasarkan komponen terdiri dari:

- Belanja operasional pegawai sebesar Rp92.647.170.000,00 atau sekitar 42% dari total pagu BSN,
- kemudian, belanja operasional barang sebesar Rp54.439.473.000,00 atau sekitar 24% dari total pagu BSN,
- kemudian ketiga, layanan yang bersumber dari PNBK sebesar Rp40.746.704.000,00 atau 18% dari total pagu, dan
- pelaksanaan kegiatan di Program Standarisasi Nasional dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp36.033.774.000,00 atau sekitar 16% dari total pagu BSN.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Alokasi anggaran BSN tahun 2025 tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN yang dikelompokkan dalam dua program sebagaimana ada dalam tabel, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp158.451.613.000,00, untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan Sumber Daya Manusia, Hukum, Humas, kemudian layanan keuangan dan umum, manajemen kinerja, organisasi dan kerja sama, penyelenggaraan pengawasan internal, serta penyelenggaraan data dan sistem informasi. Sedangkan yang kedua, untuk operasional pegawai, terutama untuk gaji dan operasional barang.
2. Yang kedua, Program Standarisasi Nasional, sebesar Rp65.415.508.000,00, akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang mencakup kegiatan terkait pengembangan standar, penerapan standar, dan penilaian kesesuaian, kemudian pengelolaan akreditasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian, dengan masing-masing rincian anggaran sebagaimana ditampilkan dalam tabel.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, apabila anggaran BSN dikelompokkan berdasarkan lingkup Eselon I di BSN, maka penggunaannya dapat dilihat secara rinci pada tabel sebagai berikut: yaitu untuk lingkup Deputi Bidang Pengembangan Standar, dialokasikan pada program standarisasi nasional yang mencakup satu kegiatan, yaitu kegiatan peningkatan pengembangan standar yang terdiri dari pengembangan standar agrokimia, kesehatan, dan penilaian kesesuaian



untuk bisa memproduksi 200 SNI dan melakukan *review* terhadap 150 SNI yang ada.

Kemudian yang kedua, pengembangan standar mekanika, energi, infrastruktur, dan teknologi informasi, juga untuk 200 SNI dan *me-review* 50 SNI yang ada.

Kemudian di bidang sistem dan harmonisasi pengembangan standar, antara lain untuk memfasilitasi partisipasi Indonesia dalam pengembangan standar internasional dengan total anggaran sebesar Rp6.486.000.000,00.

Kemudian, anggaran BSN untuk lingkup Deputi yang kedua, yaitu Deputi Bidang Pengembangan, maaf, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, yaitu yang pertama untuk kegiatan peningkatan penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, antara lain untuk memfasilitasi 2.000 usaha mikro kecil melalui Program SNI Bina UMK, diseminasi, standarisasi kepada 900 pelaku usaha, dan sertifikasi SNI untuk 135 usaha mikro kecil.

Kemudian yang kedua, Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, antara lain untuk menyusun skema penerapan SNI, menyusun persyaratan regulasi, dan standar negara tujuan ekspor, kemudian penetapan sertifikat lisensi tanda SNI dan pemenuhan kewajiban internasional di bidang penerapan standarisasi, dengan total anggaran di Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebesar Rp10.270.829.000,00 termasuk anggaran yang dialokasikan dari PNPB tidak besar, besarnya dari Rp84.055.000,00.

Kemudian, untuk lingkup Deputi Bidang Akreditasi, akan digunakan untuk akreditasi laboratorium sebanyak 1.270 kegiatan, baik untuk laboratorium pengujian, kalibrasi, produsen bahan acuan, dan laboratorium klinik atau medik. Kemudian akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk 800 penilaian, dan yang ketiga, untuk sistem dan harmonisasi akreditasi, utamanya untuk pemeliharaan 43 skema akreditasi yang saat ini sudah dioperasikan dan mempertahankan pengakuan internasional untuk 18 skema akreditasi yang sekarang sudah diperoleh. Untuk Deputi Bidang Akreditasi, total anggarannya sebesar Rp33.225.913.000,00, yang seluruhnya bersumber dari anggaran PNPB.

Kemudian untuk Deputi yang keempat, yaitu Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Yang pertama, untuk standar nasional satuan ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi, untuk memberikan layanan sebanyak 1.175 layanan kalibrasi standar nasional satuan ukuran, dan juga untuk peralatan laboratorium mekanika, radiasi, dan biologi. Kemudian untuk yang kelompok kedua, untuk standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia, untuk memberikan layanan sebanyak 750 layanan kalibrasi bidang termoelektrik dan kimia, dan tiga peralatan laboratorium termoelektrik dan kimia, dengan total anggaran sebesar Rp12.756.835.000,00, termasuk yang dialokasikan dari PNPB yaitu sebesar Rp3.606.835.000,00.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Kemudian untuk lingkup Sekretariat Utama, ada enam kegiatan utama yaitu, untuk Sumber Daya Manusia, Hukum, Humas, termasuk untuk gaji dan tunjangan kinerja ASN, Pelayanan Keuangan dan Umum, kemudian Pelayanan Manajemen Kinerja, Organisasi dan kerja sama, kemudian Pengawasan Internal, dan juga Peningkatan Data dan Informasi di BSN, di antaranya untuk mendukung SPBE BSN.

Total anggaran yang akan digunakan di lingkup Sekretariat Utama adalah sebesar Rp161.127.544.000,00 termasuk anggaran yang dialokasikan PNPB sebesar Rp3.829.901.000,00.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Kami sampaikan sekali lagi bahwa untuk lebih mengoptimalkan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian, pada pembahasan pagu anggaran sebelumnya, kami telah mengajukan permohonan pengusulan tambahan anggaran BSN tahun 2025 untuk peningkatan kemampuan tiga pilar penting infrastruktur mutu nasional, yaitu Standarisasi, Akreditasi dan Standar Nasional Satuan Ukuran.

Usulan kami rinciannya adalah pertama untuk revisi SNI yang telah berusia lebih dari 5 tahun sebesar Rp8 miliar. Kemudian yang kedua, penerapan SNI yang bersinergi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT, termasuk fasilitasi sertifikasi SNI sebesar Rp15 miliar, dan untuk melengkapi peralatan laboratorium radiasi dan medik sebesar Rp42 miliar, sehingga total usulan tambahan anggaran BSN tahun 2025 adalah sebesar Rp65 miliar.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Untuk selanjutnya, kami sampaikan pelaksanaan anggaran BSN Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan kedua, pada Tahun Anggaran 2024, BSN mendapat anggaran sebesar Rp230.848.645.000,00. Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan, terdapat blokir atau *automatic adjustment* sebesar 14 miliar, sehingga anggaran BSN setelah dikurangi *automatic adjustment* adalah sebesar Rp216.094.024.000,00.

Berdasarkan alokasi tersebut, BSN telah melaksanakan kegiatan dengan realisasi sampai dengan triwulan kedua sebesar Rp97.877.362.748,00 atau sebesar 45,9% dari anggaran BSN setelah dikurangi *automatic adjustment*. Namun saat ini, BSN telah mendapatkan persetujuan relaksasi pemanfaatan *automatic adjustment* sebesar Rp11.499.888.000,00, sehingga total pagu BSN yang dapat digunakan adalah sebesar Rp227.543.392.000,00. Sampai dengan 30 Agustus 2024, BSN telah melaksanakan kegiatan dengan realisasi sebesar Rp157.215.218.296,00 atau kurang lebih sebesar 69,1%.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,



Untuk capaian kinerja BSN sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, BSN telah menetapkan sebanyak 15.153 SNI yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan skema sertifikasinya sebesar 953 SNI, agar SNI bisa diterapkan dengan baik.

Kemudian, mengakreditasi juga atau memastikan kompetensi lembaga-lembaga penilaian kesesuaian seperti laboratorium lembaga sertifikasi dan lain-lain, sebanyak 2.534 LPK.

Kemudian, mengupayakan pemeliharaan 17 skema akreditasi yang tetap diakui di internasional.

Kemudian juga, pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran kalibrasi sebanyak 151 *Calibration Measurement Capability* (CMC) dan menerbitkan 1.520 kalibrasi oleh laboratorium standar nasional kita.

Komponen-komponen tersebut atau *output* tersebut atau infrastruktur mutu tersebut telah digunakan untuk mendukung penerapan standar bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro kecil melalui sosialisasi standarisasi kepada 6.607 pelaku usaha, sehingga ada 833.474 produk telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK dan sebanyak 342 UMKM dan organisasi mendapat pembinaan penerapan standar.

Hasil-hasil tersebut telah memberikan dampak kepada peningkatan daya saing produk Indonesia yaitu, dengan semakin banyaknya produk ber-SNI yang beredar yaitu, sebanyak 2.557 produk atau bila dilihat dari sisi jenis produknya telah mencapai penambahan jenis produk ber-SNI sebesar 46% dari target tahun 2024 ini. Kemudian, produk ber-SNI tersebut telah difasilitasi, sehingga dapat diterima di negara tujuan ekspor dengan capaian sebesar 25% dari target tahun 2024 ini.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Demikian paparan kami, kami mohon kiranya Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat dapat mendukung program dan rencana kegiatan BSN pada tahun 2025 seperti yang, seperti dukungan yang selalu diberikan selama ini kepada Badan Standarisasi Nasional.

Atas perhatian Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, kami mengucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi, santi, santi om,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,



Baik, terima kasih.

Kita lanjut dengan KPPU, silakan Pak Frans.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Dr. Ir. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,
Kepala Badan Standarisasi Nasional,
Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam,
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang,**

Dalam kesempatan yang baik ini, pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah *Subhanahu wa taala*.

Selanjutnya, izinkan kami untuk menjelaskan beberapa secara singkat agenda pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI terkait Rencana Kerja dan Anggaran KPPU Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan lain-lainnya, dilaksanakan hari ini.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Rencana kerja dan anggaran KPPU Tahun Anggaran 2025 sejalan dengan rancangan transformasi ekonomi dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029. Pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU pada tahun-tahun mendatang akan diperkuat dengan menunjukkan kontribusi KPPU pada rencana transformasi ekonomi yang terdiri dari 10 kontribusi utama.

1. Kemitraan;
2. Ekonomi inklusif;
3. Transformasi kelembagaan;
4. Akses OECD;
5. Indeks kemitraan;
6. Peningkatan GDP;
7. Digitalisasi;
8. Penegakan hukum persaingan usaha;
9. Peningkatan PNB; dan
10. Akses di 38 provinsi.

Selanjutnya, memasuki penganggaran Tahun Anggaran 2025, KPPU telah menerima surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juli 2024 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 dan Penyelesaian Rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dengan alokasi anggaran KPPU Tahun 2025 sebesar Rp105.373.198.000,00. Alokasi anggaran itu masing-masing program, serta lokasi belanja operasional adalah program pengawasan persaingan usaha sebanyak 23,6 miliar dengan penjelasan detail sebagaimana telah kami sampaikan terlampir.

Dua, program dukungan manajemen sebesar 8,6 miliar.

Tiga, belanja operasional sebesar 73 miliar.

Rincian kerja dan anggaran KPPU, kami sampaikan sebagai dalam bahan presentasi RDP ini.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan juga bahwa pelaksanaan rencana kerja KPPU TA 2025 yang berkontribusi dengan proses transformasi ekonomi akan mencapai sejumlah *outcome* sebagaimana berikut.

Kami tidak bisa bacakan satu persatu. Ada di bidang kajian advokasi, bidang penegakan hukum, pengawasan persaingan usaha di 38 provinsi, dan terakhir, dukungan manajemen sekretariat KPPU. Peran dan kontribusi KPPU tersebut, tentunya memerlukan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan pada tahun 2025.

Pimpinan, dan Anggota Komisi,

Kami sangat berterima kasih, pada tanggal 10 Juni 2024 lalu, pada saat Rapat Kerja dengan Komisi VI, Komisi VI telah menyetujui usulan tambahan untuk KPPU sebesar Rp419.766.081.000,00, sehingga totalnya Rp525.139.279.000,00, di mana alokasi tersebut, program pengawasan persaingan usaha sebesar 273 miliar, program dukungan manajemen 87 miliar, belanja operasional 164 miliar.

Rincian tambahan untuk usulan pagu anggaran KPPU Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp419.766.081.000,00. Secara rinci untuk alokasi tambahan tersebut, kami sampaikan sebagaimana dalam bahan presentasi rapat dengar pendapat. Di sini, kami memohon dukungan politik yang telah diberikan pada 10 Juni 2024 lalu, mudah-mudahan dikuatkan kembali di RDP ini, Pak, sehingga KPPU bisa mendapat tambahan anggaran dari 105 miliar tadi.

Kami sampaikan juga bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, KPPU telah merealisasikan anggaran pagu aktif sebesar Rp89.240.000.000,00 atau sebesar 75,2% dari pagu 118.546.159.000,00. Jadi, anggaran kami kalau

udah 105 itu turun sekitar 13 miliar. Sedangkan, nah ini yang perlu dicatat, untuk kegiatan penegakan hukum yang menjadi *core* inti dari kegiatan KPPU telah terealisasi sampai saat ini sebesar 95,03% ,dari total pagu Kedeputan Bidang Penegakan Hukum sebesar 17,6 miliar sekian. Jadi, kami masih punya waktu 4 bulan lag,i Pak, anggaran sudah 95,03%. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari Komisi VI, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI terhadap KPPU.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Akibat.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Dr. Ir. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):

Laporan lengkap yang.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Akibatnya apa?

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Dr. Ir. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):

Akibatnya, kinerja kami Pak di dalam melaksanakan investigasi penegakan hukum, itu terjadi banyak hal yang tidak bisa kami laksanakan, karena luasnya wilayah pengawasan kami se-Indonesia. Jadi, banyak tugas yang ditugaskan kepada kami, penegakan hukum, kajian advokasi, merger dan akuisisi, termasuk pengawasan kemitraan, tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Laporan lengkap rincian realisasi anggaran dan *output* kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dari setiap unit kerja, kami sampaikan sebagaimana dalam bahan presentasi Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR yang kami hormati,

Demikian, paparan yang dapat kami sampaikan, dan dengan penuh rasa hormat kami mengharapkan dukungan politik dari Komisi VI DPR RI agar KPPU senantiasa dapat mengemban amanat sesuai tuntutan undang-undang dan masyarakat.

Selanjutnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan penyampaian paparan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI ini.

Terima kasih.



Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Kita lanjut dengan ini, BPKS Sabang *deh* sekali-sekali kita dahulukan *nih*.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E.,M.Si, P.hD):

Terima kasih, Pimpinan.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang terhormat Pimpinan Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu para Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat Kepala Badan Standar Nasional,
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan
Wakil Kepala Badan Pengusahaan KPPB Batam (BP Batam), serta
Hadirin hadirat yang kami muliakan,**

Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa taala*, karena atas rahmat dan iradah Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dan Pimpinan Kementerian/lembaga untuk membahas tentang Pembahasan Rencana Kerja Dan Anggaran, Pagu Anggaran BPKS Tahun 2025 Dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan triwulan kedua Tahun Anggaran 2024, serta lain-lainnya.

Selanjutnya, salawat beriring salam, mari sama-sama senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,

Sebelum kami menyampaikan paparan terkait dengan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Anggaran BPKS tahun 2025, dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan triwulan kedua Tahun Anggaran 2024, serta lain-lainnya, izinkan, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI atas segala dukungan dan perhatian terhadap semua proses anggaran dan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPKS. Semoga dengan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, pembangunan dan perekonomian di Sabang ke depan akan lebih baik dalam berkontribusi bagi kemajuan masyarakat Sabang, serta masyarakat Aceh secara keseluruhan, maupun pembangunan nasional.



Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisi VI yang terhormat,

Sesuai dengan DIPA induk, BPKS menerima pagu alokasi untuk Tahun Anggaran 2024 senilai 62,3 miliar yang terdiri dari: yang pertama, program pengembangan kawasan strategis senilai Rp24,6 miliar, dan kemudian yang kedua, program dukungan manajemen senilai Rp37,6 miliar.

Dan dapat kami informasikan pula, pada tanggal 30 Januari 2024 dilakukan penandaan *automatic adjustment* belanja Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang *automatic adjustment* belanja Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,5 miliar.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa realisasi anggaran BPKS tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua sebesar 15,5 miliar atau setara dengan 24,8% dan realisasi anggaran sampai Agustus 2024 sebesar 22,3 miliar atau setara dengan 35,98%. Sejalan dengan itu, untuk realisasi penerimaan PNBPKS untuk tahun 2024 hingga triwulan kedua sebesar Rp1,8 miliar atau 27,1% dari target penerimaan PNBPKS tahun 2024 dan realisasi penerimaan sampai dengan bulan Juli senilai Rp2,2 miliar. Terkait dengan realisasi anggaran dan penerimaan BPKS tersebut di atas, kami terus berupaya melakukan *monitoring* dan evaluasi, serta melakukan langkah-langkah percepatan dalam upaya peningkatan realisasi dan peningkatan penerimaan BPKS pada akhir triwulan ketiga tahun 2024 ini.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,

Sesuai dengan dokumen rancangan awal RKP nasional tahun 2025, sebagai tahapan awal untuk Indonesia Emas tahun 2045, maka fokus rencana kerja BPKS tahun 2025, yaitu:

1. Sertifikasi dan digitalisasi aset, *database online*, aset BPKS, yaitu: tanah dan bangunan, dan penataan ruang kawasan Aceh.
2. Penuntasan pelabuhan penyeberangan Balohan dalam upaya fungsionalisasi dan komersialisasi aset.
3. Pelaksanaan *strategic* bisnis melalui penyiapan dokumen iPro, pelaksanaan promosi potensi *trade tourism and investment*.
4. Peningkatan investasi berusaha pada unit PTSP, dan
5. Fungsionalisasi dan komersialisasi aset *existing* lainnya untuk peningkatan PNBPKS dan investasi.

Bapak, Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR RI,

Sesuai dengan surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2025, BPKS



menerima pagu anggaran tahun anggaran 2025 senilai Rp53.494.482.000,00 yang terdiri dari program pengembangan kawasan strategis sebanyak 15, Rp15.813.191.000,00, yang terbagi atas rupiah murni 13,9 miliar dan BLU sebesar 1,8 miliar.

Kemudian, program dukungan manajemen sebesar 37,6 miliar yang bersumber dari Rupiah murni yang digunakan untuk biaya operasional senilai 34,4 miliar dan non operasional senilai Rp3,2 miliar. Di mana sebelumnya telah kami usulkan pergeseran re-komposisi alokasi anggaran pada pagu indikatif BPKS senilai 2,6 miliar dari program dukungan manajemen ke program pengembangan kawasan strategis. Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp53.494.482.000,00 menurun dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2024 yaitu, sebesar 62,3 miliar.

Pimpinan, dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, kami juga memohon kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI, terkait dengan penambahan alokasi anggaran BPKS untuk tahun 2025 sebesar Rp89.450.000.000,00, yang akan diperuntukkan pada kegiatan:

1. Penuntasan kegiatan prioritas nasional;
2. *Pengoptimalisasi* aset-aset BPKS dalam upaya penambahan layanan yang akan menghasilkan pendapatan;
3. Pelaksanaan promosi potensi *trade tourism and investment*, peningkatan layanan investasi dan berusaha di kawasan Sabang, dan menindaklanjuti fungsionalisasi optimalisasi dan komersialisasi aset.

Besar harapan kami permohonan usulan penambahan pagu anggaran ini akan dikabulkan dan akan menjadi stimulus dalam pengembangan kawasan khusus untuk penyelesaian kegiatan prioritas nasional pada pelabuhan penyeberangan Balohan.

Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI dapat terus mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan Sabang.

Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wallahulmafiiq ila aqwamith tariq,
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, kita lanjut pada BP Batam.



Silakan, Pak.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,

**Yang kami hormati Pimpinan, dan
Ibu-Bapak Anggota Komisi VI yang kami hormati,
Kepala Badan Standardisasi Nasional,
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan dan Pelabuhan Bebas Sabang,
Serta Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati juga,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,

Pertama, izin Pimpinan. Kami mengenalkan salah satu Deputi kami, yaitu Deputi I karena baru ganti, yaitu Pak Alexander Zulkarnain dan dia adalah Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan. Jadi, kalau ada acara-acara, mungkin menjadi PIC kami di acara tersebut. Kemudian kami juga didampingi oleh Deputi kedua, yaitu Pak Noh Suharto Pranoto terkait dengan kebijakan strategis.

Selanjutnya, pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala* yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dalam rangka Pembahasan Rencana Kerja Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2025, dan Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada yang terhormat Pimpinan dan Ibu-ibu, serta Bapak Anggota Komisi VI atas segala dukungannya bagi pengembangan kawasan ekonomi *strategic* Batam, baik dalam rangka perencanaan, maupun pelaksanaannya khususnya selama kami bertugas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Dukungan tersebut menjadi penambah semangat dan keyakinan kami dalam berusaha untuk mewujudkan kawasan Rempang, kawasan Batam, Rempang, Galang menjadi kawasan ekonomi yang berprestasi, seperti halnya kawasan serupa di negara lain.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dan periode pertama dalam RPJPN 2025-2045, sehingga posisinya sangat strategis bagi suksesnya pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan itu, perencanaan jangka panjang Kawasan Pengawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam 20 tahun ke depan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang



rencana Induk Pengembangan Kawasan Pandangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun atau Rinduk BPK.

Tema pembangunan KPBP Batam dalam tahun 2025 adalah percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pengembangan infrastruktur. Hal tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yaitu Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta dalam rangka mendukung prioritas, prioritas nasional 3 atau PN 3 yaitu, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lawan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro maritim industri, di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut, investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam difokuskan pada pengembangan industri dalam sektor-sektor strategis yang memberikan nilai tambah tinggi, yaitu *hub* logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai tinggi, industri digital dan kreatif, pusat perdagangan dan keuangan internasional, serta pariwisata kesehatan yang terintegrasi.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Pagu anggaran BP Batam tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor: S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/07/2024, tanggal 19 Juli 2024 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.992.728.199.000,00, yang berarti mengalami penurunan sebesar 69,78 miliar atau 3,38% dari pagu indikatifnya. Hal tersebut disebabkan adanya pengurangan anggaran dari pinjaman luar negeri yang semula di alokasikan tahun 2025, namun ditarik ke tahun 2024 guna percepatan penyelesaian pekerjaan. Jumlah dana pagu anggaran tersebut bersumber dari PNBK badan pekerjaan umum sebesar Rp1.978,09 miliar atau 99,27%, pinjaman luar negeri sebesar 8,76 miliar atau 0,44% dan rupiah murni pendamping pinjaman luar negeri sebesar 5,87 miliar atau 0,29%.

Pagu tersebut dialokasi untuk dua program, yaitu: yang pertama adalah program dukungan manajemen sebesar 906,51 miliar atau 45,49%, yang utamanya digunakan untuk mendanai kegiatan operasional seperti kepegawaian, pemeliharaan barang dan jasa, serta kehumasan; dan yang kedua adalah program pengembangan kawasan strategis sebesar 1.086,2 miliar atau 54,51% yang digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan investasi dan masyarakat, seperti pelayanan bagi investor, pelayanan publik dan promosi, serta program prioritas pembangunan, sarana dan prasarana untuk infrastruktur kawasan, yang meliputi ada empat, yaitu:

Yang pertama adalah pelayanan kepelabuhanan; Penyediaan air bersih; Rumah sakit dan lainnya sebesar 480,90 miliar. Yang kedua adalah

prasarana bidang konektivitas darat sebesar 469,25 miliar. Kemudian prasarana bidang perumahan dan pemukiman sebesar 88,60 miliar; dan yang keempat adalah sarana pengembangan kawasan sebesar 47,46 miliar.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Terkait pelaksanaan anggaran BP Batam tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus, realisasi belanjanya mencapai 1.176,67 miliar atau 39,82% dari alokasi DIPA yang sudah menggunakan saldo, yaitu sebesar 2.954,76 miliar. Sementara itu realisasi penerimaan BP Batam mencapai 1.717,83 miliar atau 62,87% dari targetnya.

Kinerja realisasi tersebut menunjukkan peningkatan nominal sebesar 9,29% dari realisasi belanja pada periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 1.076,64 miliar. Secara per program, realisasi belanja sampai dengan bulan Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen sebesar 495,68 miliar atau 54% dari ya sebesar 917,90 miliar, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,17% dari realisasinya dalam periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 454,01 miliar; dan
2. Adalah program pengembangan kawasan strategis, realisasinya sebesar 681,03 miliar atau 33,44% dari alokasinya sebesar 2.036,86 miliar yang berarti menunjukkan peningkatan sebesar 9,38% dari realisasinya dalam periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 622,63 miliar.

Demikian hal yang dapat kami sampaikan mengenai RKA BP Batam Tahun Anggaran 2025 dan pelaksanaan anggaran tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

Atas perhatian, bantuan dan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, terima kasih.

Kita buka sesi masukan buat teman-teman yang ingin. *Eenggak* ada? Ada *eenggak*? Ya, kita awali dengan Bapak Rudi Hartono Bangun.

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Baik, baik, terima kasih, Ketua.

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota,
Yang saya hormati Pimpinan KPPU, BSN, BPD PKS, dan BP Batam,**

Pertama, Pak Pimpinan dan rekan-rekan, saya izin mau memberikan masukan kepada dan pertama kepada BSN, karena tadi ada disampaikan oleh Pak Kepala tentang Pagu Anggaran BSN di 2025.

Tadi, Pak Kepala sudah menjelaskan bahwasanya ada pagu anggaran 223 miliar, ya, Pak, ya, untuk tahun 2025. Di sini Bapak jelaskan anggaran ini terdiri dari program dukungan manajemen. Ada 54 miliar, Pak, yang Bapak sampaikan untuk operasional barang, operasional barang di BSN. Kemudian juga, Pak, ada tadi Bapak sampaikan, 92,6 miliar untuk juga operasional, pegawai tapi, Pak. Nah jadi, ada 54 untuk barang dan 92M untuk pegawai. Dan kemudian Bapak sampaikan juga ada layanan keuangan dan layanan umum. Nah, ini saya ingin tahu, Layanan Umum ini apakah untuk masyarakat? Ini hanya 4 miliar, Pak, dan juga layanan SDM dan Bapak buat ini hubungan masyarakat juga, di *item* program dukungan manajemen ya, Pak, yang Bapak paparkan itu, *cuman* juga 2M *gitu*. Jadi, untuk yang layanan umum dan hubungan masyarakat ini *cuman* 4 dan 2M.

Ini kenapa yang saya ingin minta ke Bapak dan ingatkan kenapa anggaran BSN ini untuk layanan masyarakat dan umum ini kecil, Pak, *gitu* hanya 2M tadi *gitu* dan jauh, jauh lebih besar untuk operasional barang, yang Bapak buat 54 miliar dan juga operasional pegawai lebih besar lagi *kan*, Pak 92 miliar, *gitu*.

Kemudian dari presentasi Bapak ini juga ada 18%, Pak, dari apa itu, dana lingkaran itu, ada 18% *kan* Bapak buat pendapatan negara bukan pajak, PNBPN Pak ya, PNBPN. Nah, ini maksudnya ini saya belum paham, Pak. Pagu anggaran yang 18 miliar ini, PNBPN yang ada di BSN ini, apakah disetor ke negara atau PNBPNnya langsung di kelola atau dipakai BSN, Pak? Nah, ini yang saya ingin tahu ini. Apakah ini kumpulan PNBPN ini dari Pagu 2025 yang 220 miliar, 2025. Nah, itu mohon penjelasan, Pak Kepala, dan mungkin Pak Sekjenjnya *gitu*.

Lalu di bawah juga berikutnya, Pak, karena Bapak *nyampaikan* ada pagu anggaran akreditasi namanya. Akreditasi ini Bapak buat akreditasi laboratorium senilai 17 miliar, *gitu*. Ini juga saya ingin bertanya, Pak, ini membuat hasil lab pihak mana *gitu*. Kita mengakreditasi di laboratorium ini untuk pihak mana, Pak, golongan masyarakat yang mana, *gitu* *kan* *gitu*? Ini mohon penjelasan juga, Pak, jadi supaya yang Bapak sampaikan itu, kami bisa memahaminya *gitu*.

Dan juga ke berikutnya, Bapak buat lagi juga akreditasi lembaga inspeksi juga, inspeksi, Bapak, lembaga dan *mensertifikasi* lagi *kan* lembaga, Pak juga Bapak buat *kan* 9,4 miliar. Nah, ini seperti mengakreditasi lembaga, sertifikasi lembaga, ini lembaga yang mana kita sertifikatkan, Pak *gitu*? Nah, ini belum ada nampak saya baca, belum ada kejelasan di sini, Pak.

Dan begini, Pak, Pak Kepala. Apakah bukan pihak-pihak yang minta selama ini sertifikasi ke BSN, biasa mereka membayar, membiaya. Apakah tidak mereka membayar biaya administrasi *gitu*, kalau mereka minta sertifikat? Nah, ini mohon penjelasan. Kenapa kita misalnya masukkan lagi biaya-biaya dari APBN, *gitu*.

Dan yang terakhir, Pak, ini sebenarnya banyak, mungkin nanti kawan-kawan juga banyak ada. Realisasi di 2024 sampai Agustus ini, Bapak sampaikan *kan* ada Rp157 miliar, Pak, dari yang tahun lalu itu 2024, 227 miliar. Nah, ini yang saya baca dari paparan Bapak ya, tapi ini *kan* selesai, Pak, setelah itu, setelah itu, terima kasih, *thank you*, Bapak bilang. Nah, ini saya *enggak* ada baca detailnya laporan evaluasi penjelasannya 2024 dari paparan Bapak, hanya terima, *thank you* Bahasa Inggris, Pak. Nah itu, saya mohon penjelasan dari Bapak dan Pak Sekjen lah itu, nanti yang lain teman-teman.

Kemudian, Pimpinan dan kawan-kawan, saya ingin juga menanyakan ke KPPU, Pak. Karena, KPPU ini ada mengusulkan anggaran 2025, juga. Pak Ketua KPPU, di sini *kan* ada Bapak sampaikan *output* pengawasan persaingan usaha di 38 provinsi, Pak. 38 provinsi ini ada kalau kita hitung sekarang 550-an kabupaten/kota ya *kan*. Lalu *kan*, ini dengan ini Bapak ada minta tambahan pagu 419 ya, Pak, Pak Ketua ya, 419 miliar, yang diusulkan KPPU di tahun 2025, benar, Pak? Nah, kalau salah, mohon dikoreksi.

Ini, Pak, dengan permintaan tambahan 419 miliar dari sebelumnya 100 sekian miliar pagunya, bagaimana alokasi yang ke 38 provinsi ini, Pak? Apakah 38 provinsi ini sudah punya kantor wilayah semua? Dan apakah bisa, Pak, setelah di bagi ke provinsi, bisa tersosialisasikan anggaran ini ke kabupaten/kota, Pak? Yang kita tahu 400 atau 500 kabupaten/kota, dari Sabang sampai Merauke, Pak.

Lalu, Pak Ketua, setelah Bapak sampaikan itu ada tambahan, ada juga Bapak sampaikan begini, Pak, 273 miliar program pengawasan persaingan usaha, ya *kan* dan ini dimasukkan ke program pengawasan, Pak, begitu di Bapak buat ini. Jadi, ada 273 ini jangan juga nanti, Pak, saya *ngasih* masukan, habis untuk acara hanya seremoni, Pak, *gitu*. Tanpa masyarakat, masyarakat tahu apa yang sudah dibuat sama KPPU, *gitu*. Hanya acara seremonial *gitu kan*, Pak, tidak ada apanya, masyarakat. Karena, banyak masyarakat bertanya, Pak *gitu*. Apa tugas Komisi Persaingan Usaha di kabupaten/kota? Saya belum bisa jelaskan, Pak, karena hanya wakil rakyat. Eksekutornya, eksekutifnya Bapak dan jajaran. Mohon penjelasan.

Dan yang kedua, ini Pak. Utamanya ini, saya ingin juga mendapat penjelasan evaluasi anggaran di KPPU ini, Pak, yang sudah Bapak pakai di

Triwulan II Tahun 2024, *gitu*. Di sini kan Bapak jelaskan itu, di di buku Bapak pegang itu ada 89 miliar, dihabiskan, sudah dipakai hingga saat ini atau 75% dari 118 miliar pagu anggaran 2024. Nah, yang kita bicarakan, yang saya sampaikan ini *kan* pagu anggarannya APBN, Pak, masyarakat. Jadi makanya, kami ini, saya ini atau kawan-kawan ini berhaklah menanyakan, yang 75% ini ke mana, Pak? Sudah sampai mana? Itu mohon penjelasan.

Dan yang terakhir, pagu anggaran penegakan hukum, Pak. Ini *kan* Bapak juga sampaikan panjang lebar ini, "Sudah saya pakai 95% penegakan hukum di KPPU sebesar 17 miliar", Bapak bilang. Nah, mohon penjelasan lah apa yang ditegakkan Pak, hukum yang seperti apa ditegakkan di KPPU ini. Nah, kasusnya yang sudah selesai conbar-nya mana, Pak. Kata Pak Martin contoh barang, nah barcon ya, barang contoh, Pak.

Nah, itu Pak Ketua. Tapi, ada lagi, tapi ada Pak Haris, ada Pak Demer, ada yang lain-lain mungkin disambung mereka. Mohon penjelasan, Bapak-bapak semua, yang lain nanti BP Batam yang lain ke teman-teman.

Terima kasih, Pimpinan. Saya kembalikan.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Lalu di sebelah kiri, Ibu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Iya, terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,
Kepala BP Batam, BPKS, dan BSN, dan KPPU,**

Dimulai dari BP Batam, Pak.

Mungkin untuk masalah anggaran, nanti dari kami sudah melihatnya, sepertinya memang harus ditingkatkan, baik KPPU, Batam, BPKS, semua, BSN, ditingkatkan. Karena memang, anggarannya kecil-kecil ya, tapi saya hanya mungkin bicara masalah kinerja dari Bapak-bapak semua.

Yang pertama, BP Batam. Baru-baru ini kami dengar, Pak, akan adanya KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang berpusat di Sekupang dan Nongsa, Kota Batam - Kepulauan Riau. Nah, kami harapkan kalau ini terjadi, Pak, KEK ini, kebijakan ini kita mengharapkan dokter-dokter asing dapat berpraktik di kawasan itu. Biaya berobatnya menjadi lebih terjangkau dan devisa tidak pergi ke negara lain untuk berobat. Nah, bagaimana *nih*, Pak, perkembangannya rencana tersebut

ini, *kan* kita akan buat juga KEK di Bali Pak ya di Bali. Jadi *kan* berarti ada persaingan *nih* antara KEK di Batam dan KEK di Bali, dan kita harapkan kalau memang ini ada rencana BP Batam buat seperti ini, apa keunggulan dari KEK kesehatan-KEK kesehatan di Batam ini, sehingga mau membuatnya di Batam. Jadi, tolong sampaikan komparasi kualitas dan harga pelayanan kesehatan ketika KEK ini akan didirikan.

Terus juga, jangan sampai Bapak menggunakan dokter-dokter asing, tentu Bapak juga BP Batam menggunakan dokter-dokter Indonesia yang tentu juga memiliki kapasitas yang sama dengan dokter-dokter asing.

Lalu yang kedua, ini masalah *e-commerce*, Pak, di BP Batam untuk melindungi UMKM yang ada dalam negeri, khususnya berada di wilayah Batam dari serangan produk impor dari Tiongkok yang sangat mungkin terjadi setelah selesainya proyek revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar nanti. Mengingat di era digital saat ini, mudah sekali barang impor masuk ke dalam negeri melalui aplikasi *e-commerce*, bahkan Menteri Koperasi, Menkop UMKM menyebutkan 90% produk impor yang mendominasi *e-commerce* di Indonesia dijual oleh pelaku UMKM yang tidak mempunyai produk sendiri alias *reseller*.

Jadi, produk UMKM ini banyak ialah barang impor. Nah ini, BP Batam ini harus melindungi, Pak, ya, karena yang ada BP Batam ini adalah pintu terluar daripada negara kita, ya sehingga harus melindungi pelaku UMKM yang ada di wilayah-wilayah BP Batam dari serangan produk impor dari luar negeri.

Lalu, Pak dengan RKA K/L yang diajukan, kami bertanya tentang kelanjutan tentang pengembangan Rempang Eco City yang dan solusi untuk warga yang terdampak. Dan kita berharap tidak ada lagi demo besar lagi ya, karena penggusuran dari pembangunan Rempang Eco City, seperti tahun lalu. Itu BP Batam.

Kalau BPKS, Pak, singkat saja. Ya, anggarannya kecil, tapi apakah, Pak, untuk mengoptimalkan BPKS ini kita seperti BP Batam, Pak. Jadi, wali kotanya Sabang, apakah bisa menjadi Kepala BPKS Sabang? Jadi *kan* nanti terintegrasi ya lebih terintegrasi, apakah ini regulasi atau apa, itu mungkin Bapak juga sampaikan ya, karena BPKS Sabang ini ada juga daerah terluar dari negara kita yang perlu juga dikembangkan dengan baik.

Lalu dari KPPU, tadi sudah disampaikan oleh teman saya, kita punya 38 provinsi dan 500 lebih kabupaten/kota, dengan anggaran seperti yang Bapak punya itu, bagaimana, Pak, layanan KPPU yang dirasakan oleh para pelaku ekonomi di seluruh Indonesia mengawasi persaingan usaha, ya, di sekian banyak provinsi dan kabupaten/kota. Nah, ini perlu kami dapat gambarannya. Lalu terus bagaimana juga KPPU memantau, menyikapi fenomena pasar digital ya yang semakin meningkat tiap tahunnya, baik kuantitas bahkan juga perputaran uangnya, ya dan seperti apa bentuk konkret pengawasan KPPU terhadap pengawasan pasar tersebut.

Pak, untuk KPPU, apa pendapat, bagaimana KPPU melihat kasus pertambangan timah ya, apa antisipasi yang dapat dilakukan oleh KPPU, agar kegiatan bisnis pertambangan di Indonesia ini tidak melakukan pelanggaran persaingan usaha, sehingga pada akhirnya tidak merugikan negara dan masyarakat pengolah tambang lainnya ya. Ini apa saran dari KPPU dengan kasus timah yang terakhir dengan kerugian negara sebesar 271 triliun.

BSN, Pak, BSN, bagaimana BSN menjalankan perannya dalam melayani konsumen dalam negeri ya, karena kita sekarang barang-barang impor sangat mudah sekali masuk dengan *e-commerce* ke Indonesia, dan bahkan BSN kita melihatnya tidak bisa mengontrol kualitas barang impor tersebut ya dan sangat mudah beredar di negara kita. Nah, itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, baik. Terima kasih, Bu.

Pak Harris, silakan.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO KURNIAWAN, M.Si., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan, dan Rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat satu ketua, dengan tiga kepala yaitu, Ketua KPPU,
Kepala BSN, Kepala BPKS, dan Kepala BP Batam,**

Jadi kita ke Kepala dulu yang pertama, BSN.

Anggaran Bapak 223 miliar dan realisasinya sampai saat ini, semester 1 di 45,9%. Kemudian untuk mendukung operasional Bapak, membutuhkan tambahan anggaran senilai 65 miliar. Dari apa yang Bapak paparkan, rasanya bahan anggaran ini akan masuk akal untuk bisa diusulkan, Pak. Karena memang kalau BSN-nya kuat, seharusnya, buntutnya industri kuat, Pak. Tetapi untuk BSN, ini ada isu yang *enggak* sedap, Pak, mengenai SNI, Pak. Beberapa UKM mengeluh, apakah benar bahwa untuk mendapatkan SNI, ini membutuhkan biaya yang antara 10 sampai 40 juta? Kalau 10 sampai 40 juta untuk industri besar, ini adalah angka yang kecil sekali, Pak. Tapi kalau UKM suruh 10 sampai 40 juta, tentu ini pembunuhan, Pak, namanya, Pak, ya, ini yang pertama.

Yang kedua, apakah SNI ini juga berlaku untuk misalkan, Pak, beras dari Bulog? Kita *ndak* cerita kualitasnya, tetapi timbangannya, ya. Di Dapil saya lagi beredar cukup ramai, Pak, yaitu beras Raskin untuk Bulakamba, Kabupaten Brebes, yang seharusnya 10 kilo, ternyata ditemukan di lapangan hanya 8,45 kilo. Apakah ini ada urusannya dengan BSN atau tidak? Nanti tolong diklarifikasi.



Kemudian mengenai KPPU, Pak. KPPU ini anggarannya dibandingkan tahun lalu, tahun ini turun, dari 125 ke 105. Nah, kelihatannya balas dendam ini saudara saya dari Slawi, Pak Budi, ya *kan*? Jadi mau minta dinaikkan dari 105 menjadi 525, nah ini nanti hampir jadi nanti sebentar lagi sudah dekat 1 triliun, berarti sudah mulai Kementerian kelas A lah kira-kira, ya. Ini menarik, Pak, mungkin perlu ditambahkan, Pak, jangan hanya mengatakan bahwa, "Untuk dukungan manajemen sekian, untuk ini sekian", tetapi, "Dengan anggaran yang lima kali lipat, saya akan mencapai ini-ini dan ini", sehingga lebih mudah untuk memperjuangkan di Kementerian Keuangan maupun nanti di Banggar ya, dasarnya kuat, Pak, apalagi tadi *ngomong* untuk pegangan hukum duitnya habis. Berarti, silakan para pelanggar persaingan usaha bisa bebas sampai Desember, karena kita tahu Bapak *enggak* punya anggaran ya. Tapi hati-hati karena Pak Budi tahun depan ya, Pak Fanshrullah juga tahun depan kita punya 500 miliar, ya. Jadi kita akan hajar di tahun depan, ini menarik, Pak, ditambahkan datanya, Pak, ya, supaya lebih kuat, Pak.

Yang kedua mengenai Starlink, Pak. Mungkin juga bisa dipaparkan, Pak, kaitannya dengan persaingan usaha, khususnya tentang masuknya Starlink, ini apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan ke depannya seperti apa? Apalagi kalau bisa ditunjukkan, Pak, gara-gara langkah yang dilakukan oleh KPPU, maka negara diselamatkan dari satu kerugian besar yang harus ditanggung oleh BUMN, dalam hal ini Telkom sebesar angka sekian, sehingga tambahan 419 miliar sama sekali tidak berarti, dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita oleh pelaku usaha yang lain. Kalau seperti itu, maka dengan mudah bisa dipahami, Pak, kenapa anggaran saya harus naik lima kali lipat *gitu*, Pak ya.

Mengenai BPKS. Memang kalau BPKS, saya *ndak* akan banyak komentar Pak, karena memang mungil, Pak, ya, anggarannya 53 miliar, nanti kelihatannya juga ini minta tambahan 80 miliar *gitu* ya, Pak, dan kelihatannya *enggak* disetujui *gitu* kira-kira, Pak, ya. Sama seperti tahun yang lalu Pak, nah nanti 53-nya turun lagi tahun berikutnya, ini harus cari solusi, Pak, ya. Dan solusinya sebenarnya sudah berkali-kali dikatakan, Pak, kerja sama dengan BUMN, Pak, ya, supaya benar-benar ada rasa manfaatnya, Pak. Kalau memang *ndak* bisa dari APBN, sinergi ya dengan BUMN, *kan* akan timbul satu hasil yang jauh lebih bagus daripada pengajuan tambahan ini yang kita tahu akan susah untuk diperjuangkan.

Nah, Batam ini. Batam anggarannya 1 triliun, yang paling gede, Pak ya, dan sebagian besar sumber anggarannya *kan* dari Pendapatan Negara Bukan Pajak ya, PNBPN. Nah ini menarik, Pak, di kasus Batam ini, Pak. Tadi di *slide* nomor 4, Bapak katakan tema pengembangan Batam, Rinduk BBK 2020-245 yaitu, Karimun, Batam dan Bintan ya, sementara Kepala Otoritanya adalah Otorita Batam. Apakah dengan Rinduk ini, artinya nanti akan tarik, Pak, Ketua Otoritanya adalah gubernur bukan lagi walikota, apakah ada arah ke sana, supaya lebih terintegrasi? Apalagi kita tahu bahwa, walikotanya *nyalon* gubernur, Pak, iya *kan*? Nah, ini jadi hal yang menarik, Pak, kaitannya dengan Rinduk ini ya.

Nah, kelihatannya kalau PDI Perjuangan mendukung, susah untuk kalah ini temannya Pak Martin ya, di Batam maksudnya.

Yang kedua mengenai Rempang, Pak. Sejauh mana Pak perkembangannya? Dulu yang sampai ribut, Pak, ya, demo beberapa orang ditangkap ya, Menteri yang sekarang menjadi ketua umumnya Pak Sarmuji ya, sampai ikut turun saat itu, ya. Nah sekarang sejauh mana, Pak? Apakah sudah diselesaikan ya, ganti rugi kepada masyarakat adat, yang memang sudah tinggal di situ selama berpuluh tahun, Pak. Mungkin itu *update*-nya diinformasikan ke kami, agar paling tidak, kalau ada pertanyaan dari masyarakat, kami bisa menjawabnya dengan lebih baik.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Pak Tomy Kurniawan, silakan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Siap, terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota VI yang saya hormati,
Para jajaran KPPU,
Pak Ketua, beserta dengan seluruh jajaran yang saya hormati,
Pak Kepala BSN, beserta seluruh jajaran yang saya hormati,
Kepala BPKS, beserta seluruh jajaran, dan
Kepala BP Batam beserta seluruh jajaran yang saya hormati,**

Terima kasih, Bapak-bapak semuanya telah memaparkan terkait dengan penggunaan anggaran dan juga rencana anggaran yang akan digunakan di tahun 2025. Tentu untuk memperkuat kerja-kerja daripada lembaga-lembaga yang menurut saya sangat penting, saya mendukung bagaimana anggaran-anggaran yang masih mungkin dari pagu indikatifnya perlu ada tambahan, saya kira kita bersepakat untuk bisa ditambahi.

Kemudian, yang berikutnya adalah saya selain menyoroti terkait anggaran, saya ingin fokus kepada BSN dan KPPU, untuk membahas beberapa isu, utamanya adalah mungkin tadi sudah di *highlight* oleh Bu Nevi terkait dengan masalah perdagangan di *e-commerce* dan juga *m-commerce*, Pak. Ini menurut saya sudah sangat akut sekali, sudah perlu penanganan khusus. Saya menyarankan dari BSN atau KPPU ini membentuk unit khusus, untuk bagaimana bisa kalau BSN kaitannya dengan sertifikasi produk-produk

impor ya, Pak, yang masuk Indonesia, di SNI-kan, Pak. Semuanya wajib *gitu*, Pak.

Karena menurut saya, ini *enggak* masuk akal. Masa ada kosmetik, Pak, harganya itu *enggak nyampai* 10.000 satu *piece*-nya, itu produk impor, Pak. Ini kalau terus terjadi, ini bahaya. Teman-teman pengusaha-pengusaha kosmetik lokal ya dan juga yang sudah bertahan lama, ini sudah teriak semua, Pak, dan kemarin sudah dirilis data BPS dan juga salah satu media nasional bahwa produk tersebut itu merajai ya, merajai perdagangan kosmetik di Indonesia, Pak, nomor satu, jutaan produknya sudah dipakai. Nah, saya ingin tanya, apakah dari BSN sudah melakukan apa namanya pengawasan *gitu* ya atau melakukan sertifikasi? Nah, KPPU juga perlu turun tangan ini, Pak, karena ini dapat merusak yang namanya persaingan usaha. Bagaimana sebuah produk dijual sangat murah, kemudian dipakai oleh konsumen dan kemudian akhirnya ini jadi perang harga yang tidak sehat, seperti itu, Pak.

Jadi saya minta tolong, dengan anggaran yang ada, tolong dimaksimalkan, karena ini yang dirugikan adalah para konsumen, Pak. Saya takutnya kalau produk itu tidak tersertifikasi *gitu* ya, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BSN, itu kalau dipakai secara terus-menerus, Pak, itu nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Nah maka dari itu, saya berharap ada tindakan serius dari BSN dan juga KPPU, dalam menyingkapi masalah ini. Saya kira mungkin itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Pak Gde Sumar Jaya Linggih, silakan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Terima kasih.

**Pimpinan, beserta Teman-teman Komisi VI yang saya hormati,
Pak Kepala, beserta Pak Ketua,
beserta jajarannya yang saya hormati pula,**

Pertama-tama, tentu saya ikut berdukacita atas meninggalnya rekan kita, ya tentu ini juga menjadi bagian dari Kepala BP Batam, karena beliau dulu sangat kencang memperjuangkan BP Batam ini *ex-officio* dari walikota. Beliaulah yang merintis itu, Pak, Pak Pur, jadi beliau yang merintis itu untuk menjadi apa, walikota menjadi *ex-officio* untuk Kepala BP Batam. Semoga arwah beliau diterima bersama-Nya.



Sebenarnya agak sulit berkomentar, karena anggarannya kecil-kecil, kewenangannya besar, persoalannya banyak. Jadi persoalannya banyak, kewenangannya besar, anggarannya kecil, *gimana* caranya *tuh*, coba komentarnya *gimana* caranya, saya bingung juga berkomentar ini. Harusnya kewenangannya besar, persoalannya besar, tentu biaya yang harus dikeluarkan untuk menanganinya harus besar, *kan* begitu, Pak, ya? Nah ini, ini persoalan kita ini, apa yang harus saya komentari setelah ini *gitu*, apalagi tuntutan sekarang ini terbesar dari, baik pelaku usaha maupun tuntutan terhadap pertumbuhan kita, yang memang negara berkembang menuntut terus untuk pertumbuhan yang tinggi.

Apalagi kita, di negara kita ini, dengan penduduk yang cukup besar, sebenarnya harusnya kita terus mengelola perekonomian kita ini dengan baik, karena sumber daya alam, sumber daya manusia kita berlimpah, tapi dengan kondisi ini, tentu ya bagaimana saya harapkan, hanya saya menghimbau saja kreativitas, efektivitas *gitu*. Jadi, dari Bapak-Ibu sekalian untuk apa pun adanya kita nikmatilah, apalagi ini anggaran memang lebih banyak *given* dari Kementerian Keuangan. Saya harap, nanti banyak-banyaklah Bapak-bapak ini ke Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Kalau kami sebagai mitra, tentu pasti akan sangat mendukung, karena kami tahu kinerja kewenangan dan besarnya persoalan yang Bapak hadapi *gitu*, dan sebenarnya ini menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan kita yang lebih baik, lebih bagus ya. Hampir semua, ini semua adalah instrumen untuk pertumbuhan yang lebih baik, yang lebih bagus *gitu*, iklim perusahaan yang lebih bagus, sehingga akhirnya ekonomi kita meningkat dan tentu kalau ekonomi meningkat, kita akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan baik perekonomiannya, tentu kesejahteraan masyarakat akan bertambah, *kan* itu ujung-ujungnya.

Nah oleh karena itu, saya berharap ya menghimbau, walaupun Bapak dengan kondisi yang sangat prihatin, saya sebut prihatin karena anggarannya kecil-kecil *gitu*, dengan apa yang tadi disebut kewenangan dan apa persoalan yang besar itu.

Maka saya selamat, saya mengucapkan selamat bekerja *aja* untuk Bapak, walaupun ada sebagian yang belum di KPPU yang tadi belum ASN Pak ya, di apa. Di tempat lain yang sama berdirinya, sudah ada ASN-nya *gitu*, KPPU belum ada ASN-nya, baru 4 kalau *enggak* salah tadi cerita, Pak, ya tentang ASN-nya, mudah-mudahan ini juga diterima nanti oleh apa, kementerian untuk bisa menjadi 300 kalau *enggak* salah, orang yang Bapak Pimpin itu untuk bisa menjadi ASN. Tentu kalau sudah jadi ASN, lebih semangat lagi kerjanya, Pak. Itu barangkali, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, Bu Erma. Silakan.



F-PKB (SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P.):

Baik, Pimpinan Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semuanya.

**Yang kami hormati Pimpinan, dan Anggota Komisi VI,
Bapak-Ibu Ketua, dan
Kepala dari KPPU, BSN, BPKS dan juga BP Batam, semuanya saja,**

Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, tentu sama dengan teman-teman yang lainnya, kita mengapresiasi dari apa yang sudah di sampaikan oleh Bapak-bapak sekalian kepada kita semuanya.

Dan yang kedua juga, saya pikir memang kita *enggak* mungkin untuk mengkritisi dalam artian menyatakan bahwa, ini dananya *kegedean* dan lain sebagainya, *enggak* mungkin, karena memang anggarnya memang anggaran yang sangat kecil.

Bapak-Ibu sekalian.

Pertama bahwa, KPPU, BSN terutama adalah lembaga yang sangat strategis, yang sangat penting. Kita punya harapan besar dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai bagian dari apa namanya, penjaga dari adanya perekonomian dari kekuatan ekonomi, dari konsep usaha yang dilakukan, yang beredar atau yang ada di Indonesia, baik itu menurut kami adalah pengawasan terhadap usaha dalam negeri maupun dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Kita punya harapan besar yang saya pikir sudah sering disampaikan, bahkan ketika kita mengaca kepada Lembaga KPPU, sama dengan KPPU di negara-negara yang lain. Akan tetapi, mungkin hari ini memang kita masih belum bisa optimal, tapi tentunya *kebelumoptimalan* ini harus disertai dengan sebuah ikhtiar bersama-sama. Kayak mungkin menjadi PR yang akhirnya belum terselesaikan adalah tentang misalnya revisi undang-undangnya, itu.

Terus yang kedua, saya pikir juga harus ada kerja konkret yang usaha keras dari KPPU sendiri, bagaimana mampu mewujudkan kepada bangsa, kepada negara, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah betul-betul lembaga yang bekerja secara serius, sehingga kita akan mampu melakukan pengawasan terhadap seluruh para pelaku usaha.

Yang kedua juga, pengawasan ini tidak hanya sifatnya yang ada di nasional saja. Kalau hari ini baru ada empat perwakilan ya, Pak, ya, tujuh? Tujuh perwakilan di 38 provinsi, maka tentu harapannya adalah semakin ditingkatkan dengan apa, pengawasan yang lebih kuat lagi dan lebih detail lagi kepada seluruh provinsi yang ada.

Dan ini juga kita sangat berharap bahwa itu masif pada masyarakat untuk mereka juga tahu, sehingga ketika para pelaku usaha-pelaku usaha menengah ke bawah, mereka juga mampu untuk terlindungi dari kehadiran KPPU, ketika mereka memang mengalami situasi yang harus ter, apa namanya, tertindas atau lebih kalah daripada para pelaku usaha yang besar, yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi memang sosialisasi, kemudian pengawasan, serta menasionalkan ini semuanya memang harus menjadi bagian dari PR besar dari KPPU dan tentunya buat kita semua, terutama Komisi atau DPR yang menjadi mitra dari KPPU.

Dan catatan yang lainnya adalah bagaimana KPPU juga harus mampu menjadi pelindung buat para pelaku usaha kecil. Karena pelaku usaha kecil di Indonesia semakin banyak, dan hari ini menurut kami memang sedang mengalami apa ya namanya, kelesuan yang sangat luar biasa. Hal ini juga dialami, karena salah satunya adalah ketika mereka istilahnya dicaplok oleh para pelaku-pelaku usaha yang lebih besar dari mereka. Maka di sini memang butuh adanya kehadiran yang lebih optimal dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Nah, sisi yang lain juga, kita berharap bahwa, sebagai bagian catatan bersama, jangan sampai Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini juga hadir menjadi yang harus diawasi juga, ini tentunya catatan kita bersama ya. Artinya mengingatkan, mengingatkan bersama-sama, jangan sampai kita pengawas menjadi yang harus diawasi, itu catatan kita bersama-sama, ketika kita memang punya komitmen untuk membangun negara dengan melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha. Itu catatan untuk KPPU.

Yang selanjutnya, untuk Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Saya pikir yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi juga adalah hal yang sama yang ingin kita suarkan. Tapi sekali lagi, tentunya bagaimana BSN ini juga kehadirannya menjadi, bisa menjadi pintu yang membuat para pelaku usaha kecil juga, untuk bisa bersaing dengan memiliki tadi katakanlah standar SNI dan lain sebagainya, itu mereka menjadi bukan hal yang kesulitan buat mereka. Artinya, mereka bisa diberi jalan permudah ketika BSN itu menangani pelaku usaha kecil apa, menengah ke bawah dengan yang ke atas, itu harus berbeda. Artinya, ada perlakuan yang berbeda dalam artian mungkin entah segi biaya dan lain sebagainya, tapi tentunya kalau standar, karena ini *kan* standar ya, artinya *kan* ada hal yang memang harus menjadi standar apa, operasi ya itu harus disesuaikan tentunya iya. Tapi kita berharap masyarakat juga punya motivasi kuat, agar mereka melakukan atau mengurus SNI ini dengan maksimal, sehingga kompetisi usaha akan terjadi lebih sehat, lebih baik dan itu merata kepada masyarakat di seluruh nusantara yang kita cintai ini.

Dan kita berharap juga bahwa, standar SNI atau BSN ini hadir menjadi kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan maksimal lagi untuk kita semuanya.

Kemudian untuk Sabang, saya juga berharap karena ini *kan* sifatnya sangat lokal ya, Pak, ya, artinya ada di Sabang *gitu kan*. Kita berharap bahwa, ketika dengan adanya anggaran yang minimal, tapi tentunya ada hasil yang konkret dalam artian, dalam setiap kali tahapan.

Katakanlah tahun ini kita berharap bukan hanya landai biasa-biasa saja, tapi bisa ada capaian yang konkret yang bisa didapatkan dari BPKS, BPK Sabang ini. Karena salah satu contoh kecil yang pernah juga saya sampaikan, saya masih ingat 2015 ketika kunjungan kerja Komisi VI ke pelabuhan ya, Pak, ya, yang di Sabang itu, yang besar itu, yang diharapkan menjadi bagian dari transitnya para kontainer. Saya *enggak* tahu nasibnya sekarang seperti apa, apakah sudah lebih baik dan lebih maksimal kemudian dioptimalkan, karena itu juga saya pikir biayanya untuk membangun itu, tempat yang begitu luas dan sebenarnya *view*-nya sangat bagus, tapi kita berharap dan saya *enggak* tahu sekarang kondisinya seperti apa dan pemanfaatannya untuk apa. Apakah betul-betul kita mampu bersaing menjadi bagian dari salah satu opsi, ketika orang akan melakukan transit di Singapura bisa di situ apa tidak, atau seperti apa.

Nah, harapannya itu juga menjadi bagian dari yang *ter-report* secara optimal, sehingga BPK Sabang ini bisa menjadi kekuatan ekonomi secara pertumbuhan dan juga khususnya untuk Sabang itu sendiri.

Termasuk juga keterlibatan masyarakat yang ada di sekitar di Sabang juga kita harapkan menjadi bagian dari penguatan ekonomi juga buat mereka, sehingga pertumbuhan ekonomi dan mungkin titik di situ bisa selain penguatan ekonomi, juga wisata karena, kalau *enggak* salah di situ *kan* adalah titik nol juga ya, Pak ya, adalah titik nol maka itu bisa dioptimalkan juga.

Kemudian yang terakhir kepada Batam. Saya pikir Batam juga sudah lumayan panjang perjalanannya juga. Seingat saya dulu adalah bagian dari titik yang dicita-citakan sebagai Singapur-nya Indonesia, semoga pembangunannya atau secara fisik lebih baik lagi. Karena saya masih ingat, mungkin di tahun yang lalu, ketika saya ke Batam, menjadi daerah yang kita harapkan daerah yang bisa daerah belanja dan wisata buat masyarakat, akan tetapi secara katakanlah misalnya jalan *aja*, pinggir-pinggirannya masih penuh dengan rerumputan dan lain sebagainya. Nah artinya kita berharap bahwa, sisi-sisi optimalisasi daerah itu juga memang menjadi bagian dari daerah yang layak masyarakat Indonesia atau mungkin luar untuk layak untuk hadir atau untuk datang, untuk *shopping* atau untuk belanja atau apa pun lah di Batam.

Nah, kemudian juga sisi-sisi penguatan ekonomi yang lainnya juga bisa dilakukan di Batam. Artinya, menurut saya, Batam maupun Sabang, ini harus ada tujuan konkret secara ekonomi, pertumbuhannya lebih baik lagi, sehingga dalam sekian puluh tahun, dari mungkin tahun 2000 sampai ke sekarang ini, harus punya nilai yang progresnya lebih baik, Pak. Kita harapkan itu, jadi tidak hanya nanti kita akan harapannya akan bukan hanya itu saja, tapi sudah mulai bisa kita wujudkan bersama-sama.

Saya pikir itu prinsipnya, Pimpinan, bahwa, tentunya secara pribadi juga kita akan sangat *support* kepada KPPU, BSN, BPK Sabang, maupun Batam, untuk ketika ada harapan penambahan anggaran, sepanjang itu konstruktif, sepanjang itu untuk ke depan lebih baik lagi, tentu saya secara pribadi maupun teman-teman pasti kita akan *support* dan kita akan dorong untuk adanya penambahan anggaran tersebut.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik dari Anggota, sudah. Dari meja Pimpinan? Cukup.

Saya *cuman kepengin nambahin aja dikit*, saya lihat rekan-rekan di Komisi VI ini anggarannya banyak yang semakin turun ini, apa namanya, KPPU tadi sudah jelas perlu tambahan, kalau BSN ini agak malu-malu mintanya *gitu kan*. BPKS Sabang ini seingat saya awal-awal dulu malah 1/4 triliun anggarannya, sekarang sudah sampai ke 50-an, kalau BP Batam ini dia bisa hidup sendiri dia, tapi tentunya kita berharap bisa tambah kuat *gitu kan*.

Cuman mungkin karena kita ini juga sudah di penghujung masa jabatan DPR periode ini, mungkin kita kasih masukan, sebentar lagi *kan* ada pemerintah baru, Ini tentunya masing-masing lembaga juga harus menunjukkan relevansinya, sehingga pada saat pengajuan anggaran, kepentingan misinya ini jadi penting buat negara, *gitu kan*.

Nah, *kan* kita tahu ada beberapa prioritas yang sedang digodok oleh calon presiden yang akan dilantik besok, presiden terpilih, seperti makanan bergizi. Terus nanti *kepengin* kita juga bikin Swasembada pangan, nah, *cuman kan* ini semua akan menjadi dorongan besar untuk, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan seterusnya.

Bapak-bapak, dan Ibu-ibu,

Bapak semua *nih* saya lihat.

Tentu pada saat waktunya pemaparan, itu harus menyampaikan kira-kira apa yang lembaga kalian masing-masing bisa kontribusikan untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan seterusnya, supaya nanti bisa kita lebih mudah memperjuangkannya juga.

Karena menurut kami di Komisi VI, tentunya ini mitra-mitra kita ini juga sangat penting. Tapi ya Bapak-Ibu juga harus meyakini itu dan membuat narasinya, supaya kita bisa sama-sama memperjuangkan.

Sementara tolong kita kasih giliran untuk menanggapi, kalau ada yang mau ditanggapi. Kalau *enggak* ada, nanti kita langsung ke kesimpulan, tapi kita mulai dari kepala BSN. Silakan, Pak.

KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Izin, untuk merespons mungkin secara cepat dari pertanyaan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi VI DPR RI.

Yang pertama dari Pak Rudi Hartono Bangun, terkait dengan anggaran layanan umum dan humas yang mungkin kecil. Sebenarnya itu kegiatan, anggaran itu adalah untuk bagian humas dan bagian umum di BSN, yang menggunakan juga anggaran yang masuk dalam dukungan manajemen, Pak. Jadi termasuk dalam angka-angka yang tadi kami paparkan, ada 54 miliar untuk operasional barang dan 92 miliar untuk pegawai.

Kemudian yang kedua, terkait anggaran PNBPN BSN, karena BSN juga mengelola anggaran BNPB kurang lebih 33 miliar. Jadi pertanyaannya, apakah disetor apa langsung dipakai oleh BSN? Jadi semua pemasukan PNBPN BSN langsung masuk kas negara, Pak, tapi kita diberi, diberi hak untuk menggunakan, yang kemudian masuk ke dalam DIPA BSN sebesar 88,5% dari yang diterima, Pak. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan antara 30 sampai 40 miliar setiap tahunnya, dari pendapatan yang kita peroleh, pasti angkanya lebih tinggi dari itu, Pak.

Kemudian, akreditasi, baik laboratorium, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi untuk pihak mana? Jadi BSN berdasarkan Undang-Undang 20 2014, mendapat tugas juga untuk memastikan kompetensi lembaga-lembaga yang melakukan pengujian di laboratorium, Pak, yang melakukan sertifikasi, yang melakukan inspeksi. Nah, itulah yang kemudian cara pemastiannya kita lakukan dengan penilaian atau istilah kita, *assesment*, yang pembiayaannya adalah dari, dari lembaga sertifikasi laboratorium yang mengajukan kepada, kepada BSN melalui mekanisme PNBPN.

Jadi kalau pertanyaannya apakah itu pihak mana saja? Yang melakukan itu bisa milik pemerintah, Pak, bisa milik BUMN, bisa milik swasta. Jadi sekarang mungkin sekitar 3.000-an lembaga yang sudah diakreditasi oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional, mereka komposisinya mungkin sekarang paling banyak adalah milik, milik swasta, Pak.

ANGGOTA KOMISI VI DPR RI:

Itu dipungut lagi, Pak?

KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):

Tadi Pak, PNBP tadi, Pak. Jadi ketika mereka mengajukan untuk bisa diakreditasi, maka membayar sesuai dengan tarif PNBP, PP berapa ya? PP yang ada di BSN yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak di BSN. Nanti mereka membayar langsung kas negara, setiap tahunnya BSN mengajukan berapa keperluan yang untuk apa, melaksanakan penilaian kepada mereka untuk bisa kita berikan akreditasinya, Pak.

Kemudian realisasi, tadi tanpa penjelasan. Jadi memang sampai dengan triwulan 2, tadi kurang lebih 49%, kemudian kalau kita hitung sampai Agustus, 69%. Jadi, di antara setelah triwulan 2 yaitu, Juli sampai Agustus, kita mengadakan kegiatan cukup besar, sehingga kemudian anggarannya apa, realisasinya lumayan naik, cukup-cukup lumayan *gitu*, Pak, mungkin naik sekitar 20% dari Juni sampai, akhir Juni, sampai akhir Agustus.

Kemudian untuk Bu Nevi, bagaimana peran BSN untuk melindungi produk dalam negeri? Bagaimana mengontrol barang dari luar negeri? Jadi memang Standar Nasional Indonesia, yang diterbitkan oleh BSN yang kemudian digunakan sebagai persyaratan sertifikasi, itu sampai hari ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sukarela.

Jadi kalau sifatnya wajib, barangkali BSN bisa memberi kontribusi dalam pengawasan. Tetapi kalau barang itu yang masuk dari luar negeri, SNI-nya belum diwajibkan, ya BSN mungkin apa-apa, tapi kita melakukan kegiatan uji petik bahwa barang-barang beredar itu memenuhi SNI atau tidak, bukan untuk konteks pengawasan, tetapi untuk konteks *feedback* kepada kementerian-kementerian pembina, terutama Kementerian Perindustrian.

Kemudian dari Pak Harris Turino, jadi tadi biaya sertifikasi UKM, apakah benar 10 sampai 40 juta? Jadi memang hari ini, Pak Harris, kita sudah meluncurkan tahun ke ketiga program yang kita sebut sebagai SNI Bina UMK. Itu programnya gratis, Pak Harris, tetapi memang harus masuk OSS, karena semua melalui OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi. Ketika mereka sudah masuk ke sana, kemudian mengikuti apa yang dipandu, terutama mengisi kuesioner yang kita buat, maksimal menjawab 10 pertanyaan, sebuah UM, usaha mikro kecil yang akan mengajukan, nanti mereka akan langsung mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK. Tetapi memang ada bedanya Pak, tanda SNI Bina UMK dengan tanda SNI saja, itu ada proses, agar usaha mikro kecil itu benar-benar pada akhirnya memenuhi SNI melalui pembuktian di lapangan.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO KURNIAWAN, M.Si., M.M.):

Kalau *cuman* itu apa, Bina SM.

KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):

Bina UMK.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO KURNIAWAN, M.Si., M.M.):

Bina UMK itu gratis?

KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):

Gratis.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO KURNIAWAN, M.Si., M.M.):

Tapi kalau SNI memang 10 sampai 40, kira-kira?

KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):

Ya, tapi *gini* Pak, Pak Harris, izin menjawab langsung.

Dari kita sebenarnya pernah mengusulkan inisiasi, karena lembaga yang menyertifikasi itu banyak yang milik pemerintah, Pak. Jadi kalau pemerintah, kalau usaha mikro dan kecil, disertifikasi oleh lembaga sertifikasi milik pemerintah, mestinya bisa digratiskan juga, karena PNB di BNS juga bisa dinolkan, kalau ada, ada kebijakan tertentu.

Ini yang mungkin belum sampai, Pak. Baru Kementerian Perdagangan yang bisa membuat aturan itu. Jadi, Kementerian Perdagangan mereka mempunyai lembaga sertifikasi, yang sekarang kalau menyertifikasi usaha mikro kecil itu gratis, Pak, tidak boleh menarik biaya, tapi Kementerian lain belum, Pak. Barangkali ini yang bisa menjadi terobosan, agar pemerintah benar-benar bisa memfasilitasi usaha mikro kecil dalam konteks sertifikasinya.

Pertanyaan kedua dari Pak Harris terkait dengan beras Bulog tadi, Pak. Apakah BSN ada hubungannya atau tidak? Kalau ditarik garisnya, ada hubungannya, Pak. Jadi, BSN salah satu tugasnya adalah memastikan kompetensi laboratorium yang mengelola standar nasional satuan ukuran, karena timbang-menimbang itu adalah ukur-mengukur, Pak. Jadi yang dikelola BSN adalah memastikan 1 kilogram di Indonesia itu betul-betul 1 kilogram seperti yang ada diakui secara dunia, yang dikelola di Paris.

Nah, dalam konteks itu, maka ada istilah kalibrasi untuk timbangan. Nah, kalibrasi atau mungkin kita sering mendengar kata tera, Pak, tera. Karena sebetulnya timbangan itu menurut Undang-Undang Meteorologi Legal, Undang-Undang 2 Tahun '81, itu wajib di tera, Pak. Jadi di tera itu, intinya adalah memastikan bahwa ketika dia menimbang 10 kilogram atau 1 kilogram ya, Pak, karena standarnya adalah 1 kilogram, ditimbang di Tegal misalnya Pak, 1 kilogram itu tidak boleh beda dengan 1 kilogram yang ada di laboratorium SNI-nya BSN, yang ada di kawasan Puspitek Serpong, yang juga artinya tidak berbeda dengan internasional dan itu yang...

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO KURNIAWAN, M.Si., M.M.):

Oke, izin, Pimpinan.



Kalau memang begitu, apakah Bapak punya kantor perwakilan di Brebes? *Tulung* kasus ini Pak, ini lagi marak sekali di sana, dan yang diambil adalah jarahnya rakyat miskin, itu yang menjadi persoalan, Pak. Apakah memang timbangannya Bulog salah, celaka sekali kalau timbangan Bulog meleset 15%, atau memang ada upaya perbuatan curang yang merugikan masyarakat miskin. Minta *tulung*, Pak, BSN bisa *ngecek* ke sana, temuannya nanti videonya saya *share* ke Bapak, untuk kejadian yang baru marak mulai siang hari ini.

Makasih.

KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (KUKUH S. ACHMAD):

Izin menambahkan, Pak Harris.

Jadi sebenarnya berdasarkan aturan yang ada, itu yang mengatur adalah Kementerian Perdagangan, yang didelegasikan ke pemerintah daerah. Jadi sekarang di setiap kabupaten/kota mestinya sudah dibentuk unit Metrologi Legal. Jadi barangkali nanti kami pun paling jauh mengeceknya ke unit Metrologi legal di Kabupaten Brebes, Pak, ya. Apakah mereka timbangannya itu secara reguler dikalibrasi atau tidak ke

Kemudian, Pak Tommy Kurniawan, tadi terkait dengan kosmetik harganya Rp10.000,00, apakah BSN sudah melakukan pengawasan? Jadi memang kalau bicara kosmetik, apalagi SNI-nya ada, Pak, SNI yang berkaitan dengan kosmetik, tapi memang sampai hari ini penerapannya sukarela. Jadi seperti di awal tadi disampaikan, kalau masih sukarela, maka BSN juga tidak bisa berbuat banyak, Pak, ya, tetapi karena itu diregulasi oleh badan pengawas atau badan makanan, mestinya Badan POM, mestinya bisa melakukan lebih kuat dari BSN, karena di sana saya rasa wajib, Pak. Nomor registrasi sebagai kosmetik yang masuk dari luar, itu, Pak, untuk Pak Tommy.

Kemudian Pak, Pak Demer, terima kasih Pak, *Inshaallah* kami akan bekerja sebaik mungkin dengan anggaran yang ada dan sudah biasa berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, perguruan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi industri, dan sebagainya.

Bu Erma, saya kira sama tadi, agar pelaku usaha kecil bisa ikut bersaing. Jadi BSN mestinya bisa membuat inisiatif agar usaha mikro kecil bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di dalam negeri yang lain. Jadi, memang itu yang menjadi salah satu indikator kinerja utama BSN, menaikkan daya saing produk nasional di dalam negeri, Pak, Bu.

Saya rasa demikian, izin untuk Pak Pimpinan, Pak Haekal, saya boleh merespons sedikit, Pak. Jadi karena memang di paparan tidak ada, tetapi saat ini BSN sedang menyusun rencana strategis BSN 2025-2029, kita mengacu kepada paling tidak R, rancangan RPJP yang ada, isu-isu yang sekarang berkembang, karena kita juga mendapat masukan banyak dari pihak-pihak, apa, komunitas-komunitas tentang prioritas pemerintahan ke

depan, Pak. Jadi, *Insyah Allah* Renstra BSN juga akan diselaraskan dengan pemerintahan yang akan datang.

Demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam.

Baik, dilanjut Pak Fans.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Dr. Ir. M. FANSHURULLAH ASA, S.T., M.T., IPU.):

Terima kasih, Pimpinan.

Dari sekitar tujuh tadi yang memberikan masukan, pertanyaan kepada kami, kami, KPPU, mengucapkan terima kasih karena yang kami tangkap ini dukungan yang kuat dari Pimpinan, Anggota Komisi VII kepada eksistensi KPPU ke depan, termasuk anggaran.

Sebelum kami menjawab, nanti pertanyaan yang mungkin nanti juga ada *overlap* dari masing-masing yang *ngasih* masukan, pertanyaan tadi, kami menyampaikan, Pak, bahwa perjuangan kami menuju anggaran 525 miliar itu sudah kami sampaikan secara *argumentative*, terukur, ada *output* dan *outcome* kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan, Pak. Ini juga kami sudah sampaikan, ada secara garis besarnya di paparan kami.

Jadi, setidaknya ada 10 alasan kenapa perlu KPPU ini diperkuat anggarannya. Yang kami sampaikan di depan tadi:

1. Masalah kemitraan;
2. Ekonomi inklusif;
3. Transformasi kelembagaan;
4. Akses OECD;
5. Indeks kemitraan;
6. Peningkatan GDP;
7. Digitalisasi;
8. Penegakan hukum persaingan usaha;
9. Peningkatan PNB dan akses di 38 provinsi.

Jadi ini sudah kami sempat buat, *output*, *outcome*, apa, *action plan* yang kami mesti buat.

Nah, kami mau menyampaikan secara sederhana saja, dari 10 tidak perlu kami sampaikan satu per satu, paling tidak kami sampaikan, misalnya poin satu, kemitraan, Bapak.

Kemitraan itu sesuai data Menko Perekonomian, total pengusaha besar dan menengah itu ada 50.000, 4.500 besar, 45.000-ya menengah, sementara pengusaha mikro dan kecil ada 65 juta. Nah, KPPU diamanahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 28, satu-satunya lembaga yang mengawasi kemitraan ini dan bisa memberi denda, tidak ada lembaga lain, kementerian lain, yang bisa mendenda, hanya KPPU. Pengusaha besar itu 10 M, pengusaha menengah 5 M.

Hari ini kami dilantik 18 Januari, kami terkejut, yang ditangani oleh KPPU pengawasan, tidak lebih dari 50, 50 perusahaan saja. Artinya, tantangan ke depan, akan luar biasa, kalau tadi 50.000 pengusaha besar, menengah, ini bermitra dengan kecil dan mikro dan ini tantangannya berkait dengan GDP. Kalau tadi 8% pertumbuhan ekonomi yang ditarget, itu juga kontribusinya adalah dari bagaimana bermitra. Karena, 60% kontribusi UMKM ini kepada GDP kita. Jadi ini akan luar biasa, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga pemerataan atau keadilan, Pak. Ini satu, kami ambil contoh yang ekstremnya.

Yang kedua misalnya, kami masuk sekarang kepada persaingan usaha yang besar-besar, Pak. Kalau dulu tidak pernah, kami sekarang Shopee, masuk, Pak, Google, Lazada, pinjol pendidikan. Kemarin kami baca mitra media dari Singapura maupun di Thailand, satu-satunya lembaga otoritas yang sudah mem-*punishment* atau memberikan sikap dalam pasar digital hanya di KPPU, di Indonesia, Pak. Ini diakui, bisa diakses oleh media-media internasional, bahkan kita diapresiasi, dihubungi oleh Kementerian KPPU yang ada di Asia Tenggara, contohnya.

Kemudian yang ketiga, tadi contoh 38 provinsi, Pak, ini tadi *kan* Pak Rudi Hartono juga menanyakan, Ibu Nevi dan juga tadi Ibu Erma. Hari ini, Pak, kami punya cuma tujuh, tujuh perwakilan dari 38. Jangankan di 558 kabupaten/kota, Pak. Kami kasih contoh satu *aja*, Pak, izin di Pak Martin Manurung, Pak. Kanwil Medan, Pak, kami punya anggaran cuma 364 juta, 1 tahun, Pak. Kalau kita rata-ratakan 1 hari, 1 juta saja, Pak, biaya kami untuk mengawasi persaingan usaha, untuk mengawasi kemitraan yang luasnya, Kanwil Medan itu luasnya se-Sumatera Utara, se-Aceh, se-Kepulauan Riau, Riau dan Sumbar, Pak. *Impossible* itu bisa kami tangani ada perkara yang sifatnya masukan ke kami ataupun yang inisiatif.

Ini contoh, bagaimana kalau di wilayah Kalimantan, yang tidak jauh juga, yang luasnya, hanya adanya di Samarinda, Pak. Begitu juga wilayah kami di Makassar, luasnya ada se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara sampai ke Papua, Pak.

Jadi, kami *gimana gitu kan*. Nah, sekarang *aja* kami membatasi, kesepakatan kami 50M ke atas yang bisa kami sentuh, Pak. Kalau yang bawah-bawah itu, *udah enggak* mampu kita *nangani*.

Sebagai contoh, *output* kami yang konkret, Pak, ya, hari ini laporan kita juga ini, dari target yang mesti kami capai, *output* 24 perkara, hari ini, Pak, di Direktorat Investigasi, di Gakum, sudah 20 perkara kami tangani, Pak. Direktorat Penindakan, dari 22 perkara sudah kami laksanakan, *output*-nya 15 perkara, begitu juga di *merger* akuisisi, dari 6 perkara, sudah 4 perkara yang kami laksanakan. Kemudian juga, 57 badan usaha yang akuisisi, sudah 35 badan usaha yang kami laksanakan, Pak.

Jadi ini contoh-contoh kami yang kami sampaikan Pak, betapa, karena kami ini menyampaikan kembali Pak, KPPU ini dilahirkan tahun '99 bersamaan dengan KPU dan KPK, Pak. Ini tiga saudara kandung, Pak. KPU karena demokrasi politik, anggarannya sudah di atas sekian triliun, Pak, KPK begitu juga, tinggal KPPU *aja* ini, Pak, hidup segan mati tak mau, Pak.

Jadi sekali lagi, kami tidak berpanjang-lebar, Pak, sangat berterima kasih atas dukungan Bapak-Ibu semua, Pimpinan dan Anggota Komisi, mudah-mudahan ini waktu tinggal satu minggu, masih ada keajaiban, Pak, membantu KPPU, yang penting untuk menegakkan demokrasi ekonomi di Indonesia ini.

Terima kasih, saya tidak bisa menjawab satu per satu, nanti kami akan jawab secara resmi, Pak, semua pertanyaan ini dan masukan ini dan kami akan serahkan dalam waktu secepatnya kepada Bapak-Ibu semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, silakan Sabang.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E.,M.Si, P.hD):

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon izin, kami akan menanggapi beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi dari Pak Pimpinan sendiri, Pak Muhamad Haekal dan kemudian Bu Nevi Zuairina, Pak Harris Turino, Pak Gde Sumar jaya Linggih, dan Bu Siti Mukaromah.

Ya, kalau kita merujuk pada saat awal-awal pembentukan Sabang, Sabang ini kan dengan keputusan politik, Pak. Jadi pembentukan Sabang, di masa kolonial pelabuhan Sabang bisa tumbuh, *masak* di masa merdeka kita *enggak* bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di, di, di kawasan ini, jadi itu pertanyaan pertama.

Jadi di awal-awal memang ada anggaran hampir setengah triliun, dan pada saat itu aset-aset yang apa namanya, yang dari anggaran tersebut lalu kemudian memunculkan aset, lahan, dan sebagainya, pelabuhan. Ada yang bisa dioptimalisasi, ada yang memang menyisakan masalah sampai sekarang. Tetapi sejauh ini kami melihat bahwa proses yang sudah ada seperti Bu Ema sampaikan tadi, di sana sudah ada pelabuhan. Pelabuhan di sana ada Pelabuhan Teluk yang, yang Ibu kunjungi kemarin, di *city* 3 itu. Pelabuhan tersebut ya sekarang sudah operasional, tetapi baru sebatas kunjungan kapal *cruise*, 12 kol per tahun maksimal, belum begitu optimal, tetapi ini bisa sudah apa namanya menghasilkan PNBPN yang cukup besar, hampir 400 juta per kol, tetapi PNBPN itu tidak sepenuhnya masuknya ke BPKS Sabang, ada ke imigrasi, ke, ke Kementerian-kementerian yang lain. Jadi, itulah yang kemudian kami ingin lakukan optimalisasi untuk perlu dana stimulus untuk itu.

Yang kedua, mungkin apa namanya, kita juga membaca dan mendengar bahwa, sekarang ditemukan minyak dan gas di Andaman, di perairan Andaman, dan itu kemungkinan kita dan kita sedang mempersiapkan terminal ini, Ibu, untuk menjadi *shorebase* untuk kegiatan eksplorasi di sana.

Jadi, mohon dukungan dari Bapak-Ibu di Komisi VI, supaya ini bisa terealisasi sehingga pelabuhan yang seperti Ibu sampaikan tadi ini sudah bagus, bagaimana kemudian kita bisa optimalisasi untuk menghasilkan pendapatan di sana.

Kemudian, kita juga sudah membangun pelabuhan Balohan, pelabuhan penyeberangan, itu pelabuhan penyeberangan itu setelah dibangun itu masuk PN, Prioritas Nasional, PN2, sudah selesai dan kemudian dioperasionalkan oleh Perhubungan, hingga 1 Januari kemarin kita *take over*, karena memang itu Pelabuhan BPKS, dibangun oleh dana BPKS, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita.

Tahun ini operasionalnya sepenuhnya dikelola oleh BPKS, tetapi kita masih mengelola dengan sumber daya yang sangat terbatas, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Karena itulah kita butuh stimulus, kenapa? Karena ini menjadi pintu gerbang, pintu gerbang masuk ke Sabang. Kita melayani warga Sabang, Kepulauan Sabang, Sabang itu, Bu Zuairina, Sabang itu, kawasan kita itu terdiri dari tujuh pulau, ada lima pulau besar, ada Pulau Weh yang paling besar, kemudian ada Pulau Nasi, Pulau Breueh di, di, di apa namanya, di Aceh besar, jadi terdiri dari dua daerah kabupaten/kota. Kota Sabang seluruhnya itu masuk dalam kawasan BPKS, KPBPB kita dan kemudian ada dua, ada tiga pulau di Aceh besar yaitu, Pulau Breueh, Pulau Nasi, dan sebagainya.

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin, Pimpinan.

Pak, *nanya*, Pak, sedikit, bisnis yang mobil tanpa kena pajak itu apakah masih berlaku di?



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E., M.Si, P.hD):

Enggak lagi, yang sekarang *enggak* lagi, Pak. Jadi ada aturan-aturan yang sekarang kita juga sekarang sedang, sedang mencoba membicarakan dengan kementerian terkait, karena izinnya sekarang terkendala. Termasuk impor gula, karena diharuskan harus ada SKI dan SNI, jadi ini juga ada isu yang lain.

Yang Balohan ini, ini pintu gerbang, dia melayani 40.000 warga Sabang dan kemudian di Pulau Breueh dan Pulau Nasi itu ada 5.000 warga Aceh besar di Pulau Breueh dan Pulau Nasi yang warga negara Indonesia juga, berada di wilayah pulau terbesar. Jadi ini memang tidak bisa disandingkan dengan KPB, wilayah-wilayah kawasan yang lain, karena memang ini daerah terluar, daerah ujung, yang mungkin ya kita belum sepenuhnya bisa menjalankan bisnis KPBPB di sana, tetapi saya kira ini merupakan bagian yang harus dikelola oleh negara.

Jadi ini yang, yang kemudian kami mohon, apa namanya, mohon perhatian dan atensi kita bersama bahwa ...

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin, Pimpinan, menambahkan.

Pak, jadi begini, saya pernah lihat Batam dan juga lihat Sabang. Batam ini ada sedikit kebebasan dan lain-lainnya dari segi apa pun, ya *kan*, tapi kalau kita di Aceh *kan* ada dari kultur, agama, segala macamnya, ada batas-batas. Jadi untuk berbisnis itu saya pikir itu, itu agak *mandek*, Pak, *gitu*, itu harus di dikaji juga, Pak.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E., M.Si, P.hD):

Setuju, Pak, Pak Rudi Hartono.

Jadi, tapi mungkin Sabang tidak sepenuhnya identik dengan wilayah lain di Aceh. Masyarakat Sabang ini *kan* tumbuh sekian abad ini sebagai masyarakat pelabuhan, masyarakat yang kulturenya pun kultur, kultur pelabuhan, sangat permisif, mereka tidak, apa namanya, tidak pernah ada gangguan keamanan, turis di sana juga bisa berbikini, bisa, bisa melakukan aktivitas *tourism* dan sebagainya, jadi tidak terlalu. Karena yang syariat Islam, misalnya itu *kan* hanya untuk kalangan lokal. Jadi, saya sepatutnya tadi seperti apa usulan Pak Harris Turino, anggaran kecil, kita minta tambah, jalan keluarnya kerja sama dengan BUMN, misalnya.

Kami mencoba, jadi mohon arahan, karena BUMN juga saya kira di bawah Komisi VI, jadi kami juga mengharapkan itu. Tadi pagi, pagi dan sampai menjelang siang kami melakukan, menawarkan kerja sama dengan

BUMN, perhotelan, karena sekarang, apa namanya, laju pertumbuhan pariwisata itu luar biasa.

Sekarang kunjungan wisatawan lokal, domestik tahun 2023 kemarin 400.000 lebih, kemudian ya apalagi yang sekarang PON, tidak ada hotel yang *representative*, tiap kali *peak season*, tiap kali masa liburan, orang harus menginap di apa namanya, di, di mobil, dan sebagainya. Jadi masyarakatnya kita siapkan sekarang, kita siapkan, dan inilah kemudian yang kita butuh stimulus Bapak-Ibu sekalian, para Pimpinan dan Anggota Komisi VI. Butuh stimulus pada saat kita mengoperasikan Pelabuhan Balohan sebagai pintu gerbang, sebagai, sebagai apa namanya, konektivitas antara masyarakat Sabang dengan masyarakat di *main land*, di Banda Aceh, ada 40.000 orang di sana. Jadi ini, ini butuh, apa namanya, butuh dana stimulus untuk kita bisa gerakkan itu. Dan itu belum tercermin dalam anggaran kita sekarang. Kenapa? Karena memang sebelumnya itu dikelola oleh Dinas Perhubungan. Kami, ini yang kami coba komunikasikan juga dengan Bappenas dan dengan, dengan Kementerian Keuangan, karena pada saat kita mengelola ini, kita butuh anggaran yang, yang ideal untuk itu.

Kemudian, ya rencana ke depan, kita akan memanfaatkan misalnya yang Terminal *City 3*, di luar yang Balohan itu sebagai, sebagai *shorebase* untuk mendukung kegiatan Migas. Kemudian, kita juga sekarang melakukan kerja sama mulai membahas, mulai menginisiasi dengan, dengan India, rencana kerja sama pemanfaatan pelabuhan melalui kerja sama pemerintah dengan Pemerintah India. Jadi ini menjadi isu yang...

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin, Pimpinan, sedikit.

Pak, Pak Kepala saya menanyakan, Walikota Sabang, ada wali kotanya, Pak?

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E., M.Si, P.hD):

Ada.

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

BPKS ini berbeda sama walikota, tidak satu atap dengan seperti BP Batam dengan Walikota Batam, ya?

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E., M.Si, P.hD):

Iya, dalam Undang-Undang 37 Tahun 2000 tentang, tentang apa KPBPB Sabang ini, di Pasal 4 itu disebutkan, ayat (1) Presiden menetapkan dewan kawasan Sabang. Dewan kawasan itu kemudian di Pasal 2, ayat (2),

Dewan kawasan itu diketuai oleh gubernur dan Anggotanya adalah Walikota Sabang dan Bupati Aceh besar.

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Jadi ini *nambahkan* sedikit, *ngingatkan* Pak Kepala. Kalau tidaklah sinkron gubernur dengan dana Otsusnya, ya *kan*, yang melimpah, niat untuk membangun Batam atau wali kotanya seperti di Batam dengan BPKS, bagaimana, Pak? *Gitu. Kan* ini harus ada juga usulan Bapak itu ke pusat, itu saya *ngingatkan aja*.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E., M.Si, P.hD):

Baik, *makasih*, Pak Rudi.

Sejauh ini komunikasi kita dengan, dengan gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan, dengan walikota dan bupati itu cukup bagus, harmonis. Dan kita selalu mengadakan rapat, hampir setiap bulan kita melakukan rapat bersama antara gubernur, walikota dan Bupati Aceh besar, koordinasinya sejauh ini berjalan dengan baik, Pak.

Iya, ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Jadi mungkin itu saja yang perlu kami tanggapi ya, sekali lagi kami mohon dukungan dari para Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VI, mudah-mudahan kami masih sangat berharap supaya bisa apa namanya, bisa mendapat bahan anggaran terutama untuk *item-item* kegiatan yang kami sampaikan tadi.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Jadi Bapak khusus Sabang ini, salah satu ini *kan udah, udah* lama ini kita membicarakan ini, memang kemarin di awal 2019 sempat kita sudah mau coba susun, *cuman* terus negara dilanda Covid, tapi memang secara konseptual harus di, waktu itu *kan* kesepakatannya adalah meminta bantuan, mungkin dari Kementerian BUMN yang punya *resources* untuk secara konseptual mau di *apain*. Peran apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Sabang dalam bagian daripada perekonomian Aceh, perekonomian Indonesia ataupun perekonomian regional *gitu kan*.

Nah, peran itu harus dipastikan *gitu kan*, sehingga baru bisa dibikin *road map*-nya untuk mencapai atau mewujudkan peran itu, apa pun itu perannya *gitu kan*, apakah mau jadi pelabuhan transit, tempat wisata, ataupun

shorebase buat, buat apa, ladang minyak atau ladang gas baru. Nah, kalau itu sudah di *fix-kan*, *kan* baru ketahuan, anggarannya perlu berapa, pemain-pemainnya siapa, apakah melibatkan Pertamina ataupun PLN ataupun siapalah.

Nah, itu yang rasanya *nih* mumpung ada peluang *start* baru. Nanti *kan* pemerintahnya baru, gubernurnya juga *Insya Allah* baru. Nah, presidennya baru. Nah, maksudnya itu kalau bisa disinkronkan agak di awal nanti, apa namanya, sebab *enggak* bisa kayak Bapak *nih*, Kepala BPKS Sabang datang ketemu Menteri, ini *kan* mungkin *enggak* dilirik sama dia *gitu kan*, itu harus ada bantuan dari kita ataupun bantuan dari gubernurnya. Karena sampai hari ini menginduknya *kan* ke gubernur, sebetulnya.

Nantilah, setelah ini kita, kalau sudah ketahuan orang-orangnya siapa *gitu kan*, bisa kita ini, bisa kita lancarkan lagi *nih* kegiatan ini.

Baik, Kepala BP Batam, silakan.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Makasih, Pimpinan.

Jadi ada beberapa pertanyaan, saya akan mencoba menyampaikan beberapa gambaran, mohon maaf kalau nanti kalau kurang tajam, Bapak-Ibu sekalian.

Mungkin yang pertama terkait dengan pertanyaan Ibu Nevi, mengenai anggaran. Jadi anggaran harus ditingkatkan. Mungkin kami bisa sampaikan secara organisasi, Bu, secara garis besar info bahwa, BP Batam ini adalah sifatnya adalah BLU, Badan Layanan Umum. Jadi kami punya tugas layanan yaitu, dalam rangka mendorong investasi, kemudian memperlancar prosesnya, dan lain-lain. Kemudian di sisi lain, kami juga diberikan kewenangan untuk mengelola aset. Ada beberapa aset yaitu, vandara misalnya, pelabuhan, kemudian SPAM, rumah sakit, yang itu bisa kami pungut PNBPNya. Jadi, maka kemudian kami selalu mengoptimalkan penerimaan PNBPN tersebut, dalam rangka membiayai layanan kami untuk menarik investasi. Namun, kendalanya adalah bahwa, kami tidak boleh *charge* itu terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi, nanti akan mengganggu *logistic cost*. Jadi memang optimalnya adalah investasi tetap bersaing, namun kita dapat PNBPN.

Dalam perkembangan terakhir, terutama setelah tadi apa, BP Batam dikelola *ex-officio* antara walikota dengan Kepala BP Batam yang tadi disampaikan oleh Pak Demer, memang PNBPN kami cukup meningkat signifikan, Pak, dalam 5 tahun terakhir ini sudah, yang dulu memang sekitar 1 triliun, ini sudah jauh melewati 1 triliun.

Beberapa hal yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan, itu memang melakukan kerja sama untuk berapa aset itu dengan mitra yang lebih profesionalnya, misalnya dengan,

untuk bandara kami kerjakan, kerja sama akan dengan konsorsium antara Incheon, kemudian Pelindo dan Wijaya Karya, kalau tidak salah. Nah, dengan kondisi tersebut, PNBP kami ada peningkatan dan selain itu juga ada peningkatan pembangunannya untuk peningkatan infrastrukturnya.

Kemudian aset lain ya itulah Batu Ampar misalnya, pelabuhan itu kita kerja samakan dengan PT Persero dan sekarang sudah menampakkan juga beberapa perkembangan penerimaannya.

Kami juga baru saja menyelesaikan kerja sama, maksud saya memulai, menyelesaikan proses dan memulainya adalah Pelabuhan penumpang Feri internal batu, Batam *centre*, itu juga kami kerja samakan, agar pelayanan meningkat, sekaligus PNBP-nya meningkat.

Namun demikian Bapak-Ibu sekalian, meskipun PNBP kami benar kami tingkatkan, tapi pada akhir-akhir ini ada beberapa program yang memerlukan biaya besar, yaitu adalah ada tiga prioritas apa, maaf, tiga proyek strategi nasional yang ada di Batam. Nah, ini memerlukan pembangunan infrastruktur yang sangat besar yaitu, PSN Rempang *Eco-City*, PSN Galang *Green Economy* dan PSN PLTS. Nah itu, makanya kemudian sebetulnya ketika Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran, kami mohon dukungan rupiah murni, Pak. Tapi ternyata memang karena keterbatasan anggaran nasional, jadi kami tidak mendapatkan itu, dan kami akan berusaha untuk mendanai dulu dengan PNBP yang ada di kami, ya. Mungkin nanti akan APBN nya akan lebih *refocusing*, jadi hal-hal yang tadinya ada, sudah kami anggar, tapi karena munculnya proyek-proyek yang baru yaitu, PSN, maka mungkin akan kami realokasi ke sana, tapi secara prinsip memang...

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin, Pak.

Saya mau tanya, *kan* Bapak bilang, dikutip PNBP lalu kami pergunakan, apakah ada aturan yang bisa langsung dikutip itu Pendapatan Negara Bukan Pajak tanpa disetorkan ke Kementerian Keuangan, ada seperti itu regulasinya, Pak?

BADAN PENGUSAHAAN BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Izin, Pak. Karena kami memang BLU, jadi PNBP kami langsung bisa digunakan, Pak. Karena Badan Layanan Umum.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi yang ditentukan biasanya *kan* persentasinya, ada batasan persentasinya *kan*.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Total, Pak.

Kalau BLU, semua PNBP-nya bisa di langsung digunakan.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

100%?

BADAN PENGUSAHAAN BATAM (MUHAMMAD RUDI):

100%, Pak.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

i ya. Iya, nah.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Kami *kan* harus bahas dengan Komisi VI juga, dengan Pemerintah, dengan Kementerian Keuangan juga.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

BADAN PENGUSAHAAN BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Izin, melanjutkan.

Bapak-Ibu sekalian,

Nah kemudian, kalau itu yang kami sampaikan antara kondisi lembaga BP Batam dan upaya optimalisasi penerimaan.

Kemudian, langsung saya sambungkan aja dengan pertanyaan Pak Harris, terkait dengan nanti dengan Rinduk BPIK, Pak. Jadi memang sekarang ini statusnya arahan dari Menko, kami untuk semacam *hold* dulu kondisi BP Batam terkait dengan kelembagaan, karena nanti akan ada Kepres. Jadi, sebetulnya ketika sekarang kondisi PP seperti sekarang ini, kemudian akan melaksanakan PP 41/2001, Pak, harus akan ada Kepres tentang Dewan Kawasan. Jadi Kepres, Kepres itu akan diatur antara lain mengenai kelembagaannya, termasuk apa bentuk kelembagaannya, jadi satu atau seperti apa, kemudian termasuk Ketua Dewan Kawasannya siapa.

Jadi, kalau nanti kami ke depan masih menunggu arahan dari Menko adalah presiden baru, presiden terpilih untuk dilantik, kemudian arahnya dari presiden baru seperti apa, baru mungkin bisa kita ketahui Ketua Dewan Kawasanya siapa dan Ketua BP-nya juga siapa *gitu*, Pak, terkait dengan ketenagaannya. Mungkin terkait dengan anggaran itu.

Kemudian, kami lanjutkan terkait dengan Ibu Nevi lagi adalah terkait dengan KEK kesehatan. Di, namanya KEK Pariwisata Kesehatan di Sekupang dan Nongsa, Bu. Jadi lokasinya ada di Sekupang sebagian dan di Nongsa sebagian. Mungkin *background* daripada pembentukan KEK tersebut adalah bahwa, di sekitar Batam dan Sumatera itu disinyalir ada dana sekitar 110 triliun per tahun, itu terbang ke luar negeri karena berobat, maka kemudian dipikirkan untuk mendirikan KEK kesehatan di situ. Harapannya adalah bahwa, maaf, bahwa, di situ nanti akan didirikan Rumah Sakit Internasional Batam, yang merupakan kerja sama antara Rumah Sakit Mayapada dengan Rumah Sakit Apollo di India.

Harapannya, dengan pendirian Rumah Sakit Internasional itu ada dua keuntungan, yang pertama adalah ada devisa yang ditahan yaitu, tadi, harapannya yang tadinya dari daerah Batam dan Sumatera terbang setiap tahun 110 triliun itu, sebagian ke Batam saja, karena di situ akan ada kualitas pengobatan dengan dokter-dokter khusus, yang memang *centre of excellent*.

Misalnya di rumah sakit situ nanti akan ada ahli-ahli kardio, ahli onkologi, ahli neurologi dan *gastrohepatologi*, serta urologi. Harapannya, tentu saja memang dokter-dokter yang dipanggil adalah dokter-dokter yang punya keistimewaan, Bu. Dengan adanya dokter-dokter tersebut, nanti akan ada pasien-pasien yang semula berobat tadi ke Malaysia, ke Singapura, dan lain-lain itum dari Sumatera dan Batam jadi berobat ke Batam saja, jadi ada devisa yang sebagian mungkin tertahan.

Selain itu, karena kita kerja sama dengan Rumah Sakit India Bu, infonya bahwa di daerah ASEAN ini belum ada Rumah Sakit India. Menurut info dari surveinya bahwa, biasanya orang India itu akan berusaha berobat kalau sakit di rumah sakit yang dokter-dokternya India. Jadi harapannya nanti dari wilayah ASEAN itu ada yang dulu berobat langsung ke India, nanti akan berobat yang lebih dekat ke Batam. Itu hal-hal yang, hal-hal utama yang kami harapkan dari KEK Kesehatan.

F-PD (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin, Pimpinan. Izin, Pak, mau *nanya*.

Itu KEK-nya itu wacana atau sudah ada dibangun rumah sakitnya, Pak? Karena kalau, kalau saya kita melihat, Pak, ya, kita kemarin ke Singapura, *kan* hanya *sebelahan aja* Pak, Selat atau sungai atau apa.

Di Singapura memang semua *kan* US, Pak, mahal. Kalau saya *nanya*, yang menengah itu dari pengusaha kecil, UKM, sampai *driver*-nya, mereka punya uang, berharga, kalau dikirim ke negara yang lebih rendah mata uang

seperti Indonesia dan banyak mereka *beliin* aset *kan* di Batam, Pak. Tapi wacana Bapak itu bagus, tapi realisasinya, Pak, kami mau dengar yang benar *loh*, Pak BP, *gitu*.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pimpinan.

Saat ini sedang dalam proses penetapan oleh Kepres, PP ya, Pak, dengan PP, Pak. Jadi KEK itu ada harus ditetapkan dengan PP, tapi persiapan di lapangan sudah banyak kami lakukan, misalnya proses pengadaan tanahnya, perencanaan untuk kerja samanya, dan lain-lain. Jadi sudah, memang belum selesai, belum jadi, tapi memang itu sudah proses yang cukup matang untuk dimulai, Pak.

Izin meneruskan. Selain dari ada Rumah Sakit itu, nanti akan ada yang kita sebut sebagai *retirement villages*. Tadi Bapak sebutkan betul, bahwa nah akan ada *demand* yang tinggi di Batam untuk para orang tua dan pensiunan dari Singapura. Jadi akan ditaruh itu, disiapkan yang di KEK ini, Pak, harapannya nanti *demand*-nya tinggi, jadi ada semacam panti-panti untuk pensiunan orang-orang tua yang dari Singapur ditaruh di Batam, dan itu harapan salah satunya penerimaan atau permintaan untuk KEK Kesehatan Batam, Pak.

Kemudian terkait dengan yang di Bali, Bu, namanya tidak bersaing, karena yang di Bali *kan* kerja sama dengan Amerika, jadi orientasinya kelihatannya lain dan juga domain pariwisatanya lebih kental yang di Bali. Kalau yang di Batam ini lebih ke tadi kami sampaikan, *retirement villages*.

Kemudian yang terkait UMKM, Ibu Nevi yang kami hormati, bahwa sebetulnya BP Batam ini memang diberi kewenangan untuk mendukung investasi dengan kewenangan untuk mengatur masuk, masuknya barang. Namun, kami sampaikan bahwa yang boleh diatur di Batam, oleh BP Batam adalah yang untuk keperluan investasi di Batam dan konsumsi hanya di Batam saja. Kalau yang untuk keluar, kami tidak, sebenarnya tidak punya kewenangan untuk itu. Makanya kemudian ada kriteria bahwa, yang kami berikan izin itu adalah untuk kebutuhan penduduk Batam, hanya untuk di, tidak diperuntukkan bahan baku dan penolong, kemudian ada kode HS, yaitu *broad economic category* atau BEC.

Jadi sebetulnya kami kalau ada yang misalnya keluar, ke wilayah Batam, itu sebetulnya bukan dalam lingkup kedudukannya BP Batam. Tapi meskipun demikian kawan-kawan di Bea Cukai dan Kemendag sudah antisipatif dengan hal tersebut. Tapi kalau kami dari BP Batam, tugasnya adalah terkait dengan investasi tadi, Bu, meskipun itu barang adalah bahan baku, bahan penolong dan konsumsi, tapi konsumsi yang mendukung investasi, ya cuma tidak terlalu luas.

Kemudian kami sampaikan juga bahwa terkait dengan yang Ibu tadi sampaikan mengenai RKA K/L. Jadi mengenai kelanjutan Rempang *Eco-City* agar tidak ada demo, dan lain-lain. Jadi kami sekarang terkait dengan warga terdampak, memang kami proses terus, meskipun memang di berita-berita mungkin masih ada semacam beberapa unjuk rasa. Tapi kami sampaikan bahwa, perlakuan atau tindak pelayanan terhadap warga terdampak itu ada banyak hal. Yang pertama adalah yang sudah bersedia, itu direlokasi sementara. Jadi relokasi sementara itu artinya karena rumahnya belum selesai dibangun, Bu, mereka disewakan, disewakan untuk bisa mencari sewa sendiri rumah atau misalnya tempat-tempat lain dan setiap bulan diberi uang sewa 1,2 juta. Kemudian untuk biaya hidupnya, untuk masing-masing setiap anggota keluarga juga diberi, per jiwa diberi tunjangan hidup 1,2 juta untuk biaya hidup, Bu, selama relokasi sementara.

Relokasi sementara ini dibatasi 12 bulan saja dan dalam waktu 12 bulan ini kami siapkan rumah, rumahnya di Tanjung Banun itu spesifikasinya adalah tipe 45 dengan harga sekitar 130 juta, di atas tanah seluas 500 meter persegi. Kemudian selain itu, bagi warga terdampak yang punya tanaman tumbuh juga diberi ganti rugi tanaman tumbuhnya, yang nilainya ditetapkan oleh tim penilai *independent*, itu juga dibayar oleh BP Batam.

Dan selain itu, juga nanti ada program yang disebut, kita sebut sebagai Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak. Jadi nanti di sana akan didorong atau dibantu untuk melakukan usaha-usaha dan pemasarannya adalah pemasaran dan permintaan juga akan diupayakan untuk ada. Jadi nanti ke depan, kehidupan dari masyarakat itu harapannya tidak terganggu atau tidak terlalu lama terganggu.

Dan selain itu, untuk anak-anak muda yang nanti ada di terdampak itu akan diberikan pekerjaan-pekerjaan. Dan sekarang sudah mulai ada, Bu, mungkin sekitar 100 atau 150 yang sudah dipekerjakan di lapangan. Mungkin terkait dengan Rempang.

Nah, kemudian tadi kami sampaikan juga yang tadi Pak Harris menanyakan juga, sejauh mana perkembangan ganti rugi? Kami sampaikan bahwa, sekarang dari tahap totalnya itu *kan* sebetulnya ada sekitar 200, 2.000 maaf, 2.630 KK, Pak. Yang tahap pertama ada 963 KK, 190 KK sudah pindah ke lokasi sementara dan sebentar lagi pasti akan ke lokasi tetap, kemudian 4, 433 orang, KK maaf, 433 KK sudah mendaftar. Nah, sekarang ini sedang dalam proses pembangunan rumah-rumah yang untuk tempat pindah itu berikut berbagai fasilitasnya. Jadi fasilitasnya lengkap, ada air, listrik, termasuk sekolah, puskesmas, kantor-kantor pemerintahan, dan lain-lain. Dan terkait dengan hal ini, BP Batam dengan sinergi dengan Kementerian PUPR, sudah menyiapkan anggaran yang diperlukan.

Kemudian pertanyaan dari Pak Harris tadi yang terkait dengan Rinduk, saya sudah kami jawab, kemudian yang terkait dengan Pak Demmar mengenai *ex-officio* kami, terima kasih, Pak, tadi bahwa dengan *ex-officio* tadi, memang selama 5 tahun banyak juga kemajuan yang telah kami capai. Tadi, penerimaan sudah meningkat di atas 1 triliun.

Kemudian menyambung juga yang pertanyaan Ibu Erma bahwa, kami membangun berbagai macam infrastruktur, Bu. Jadi kalau Ibu mungkin akhir-akhir ini hadir di Batam, ada jalan 5 lajur, kiri-kanan, Pak No ya, dari bandara ke arah yang Simpang jam, Bu. Jadi itu jalur yang harapannya antara pusat logistik dan pusat logistik yang lain itu sudah lima jalur di sebelah kanan, lima jalur sebelah kiri.

Kemudian juga sedang kami kerjakan *flyover* di dekat Simpang jauh darat danau Sei Ladi Bu, harapannya nanti kalau sudah itu jadi, arah dari Sekupang dan lain akan sangat lancar.

Kemudian juga, kami sedang berusaha untuk membangun Bandara melalui tadi KPBU, tahap pertama, pembangunan Terminal 2 di Bandara Hang Nadim, kemudian beberapa *water treatment* juga sedang kami bangun, kemudian Pelabuhan Batu Ampar kami kerja samakan untuk perluasnya, serta Pelabuhan Penumpang Feri Internasional di Batam *Center* juga sedang kami laksanakan untuk dibangun.

Namun, kalau jalan-jalan yang sifatnya untuk *public service*, itu memang kita sinergi dengan pemerintah kota, Bu. Jadi jalan-jalan yang dulu meskipun dibangun oleh BP Batam, telah dihibahkan, kalau itu bersangkutan masyarakat, akan dihibahkan kepada Pemko Batam. Kemudian, terkait dengan fisik, itu tadi yang kami sampaikan.

Kemudian yang dari Pimpinan, dari Pak Hekal, kami terima kasih kepada Komisi VI, sehingga perkembangan Batam cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, Pimpinan. Namun, memang kami dengan Dewan Kawasan yaitu, Pak Menko, masih jauh dari puas dan kami akan ke depan akan berusaha memperbaiki, baik pembangunan maupun tata kelola di KPBM Batam, Pak.

Kemudian tadi terkait dengan hal yang lain mengenai relevansi dan lain, memang kami, kami telah sampaikan bahwa kami *nunggu* pelantikan Presiden terpilih untuk kebijakan-kebijakan lebih lanjut atas arahan dari Kemenko Perekonomian, kalau masih menjadi nanti Dewan Kawasan, Pimpinan.

Mungkin kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan, bila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, baik. Terima kasih.

Setelah selesai semua, tinggal kita bacakan kesimpulan.



Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tentang Pembahasan RKA-K/L Tahun 2025 dan Pelaksanaan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan 2 Tahun Anggaran 2024, Senin, 2 September 2024.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebesar 69,1% dari Pagu Anggaran tahun 2024.
 - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar 75,28% dari Pagu Anggaran tahun 2024.
 - c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar 39,82 dari Pagu Anggaran tahun 2024.
 - d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebesar 35,98% dari Pagu Anggaran tahun 2024.

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI mendorong Badan Standarisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk meningkatkan Realisasi Anggaran Tahun 2024 untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Badan Standarisasi Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 di mana ditetapkan Pagu Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. **Badan Standardisasi Nasional (BSN)** sebesar Rp223.867.121.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) terdiri, yang terdiri dari:



- (1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp158.451.613.000,00 (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*)
 - (2) Program Standardisasi Nasional sebesar Rp65.415.508.000,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- b. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** sebesar, sebesarnnya sekali aja itu, Rp105.373.198.000,00 (*Seratus Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:
- (1) Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp23.695.637.000,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*)
 - (2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp81.677.561.000,00 (*Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*)
- c. **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)** sebesar Rp1.992.728.199.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:
- (1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp906.514.280.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
 - (2) Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.086.213.919.000,00 (*Satu Triliun Delapan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*)
- d. **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)** sebesar Rp53.494.482.000,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:
- (1) Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp15.813.191.000,00 (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*)
 - (2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp37.681.291.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*)

Sudah benar angkanya?



Wakil Ketua DPR, ya bisa memberikan angin dan harapanlah untuk Bapak-bapak sekalian, tapi nanti tunggu Pak Prabowo dilantik katanya.

Baik, angka-angka ini sudah benar? Sudah diperiksa masing-masing? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor tiga, itu memang sengaja teleponnya pas sebelum kita ketok *gitu*.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebesar Rp65.000.000.000,0 (*Enam Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang digunakan meningkatkan pelaksanaan, ya itu harus ada untuk, yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program standarisasi nasional.
 - b. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp419.766.081.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang digunakan untuk mencapai target *outcome*.

Masa target *outcome* KPPU, target capaian lah atau apa, Pak? Bahasa singkatnya apa, Pak Fans? Ya target capaian lah ya, target capaian KPPU.

- c. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) sebesar Rp89.450.000.000,00 (*Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang digunakan untuk Program Pengembangan Strategis Nasional.

Oke, sudah benar ya angka-angkanya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada BSN, KPPU, BP Batam, dan BPKS, itu enggak perlu di ya, untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

(RAPAT: SETUJU)

Oke, *Alhamdulillah* kita sudah sampai pada penghujung rapat RDP kita pada hari ini. Lewat, pas, sejam. Kalau begitu kami mengucapkan *alhamdulillah*, rapat kita tutup ya? Baik, terima kasih.

Atas nama Pimpinan Komisi VI, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi VI dan tentunya kepada BSN, KPPU, BPKS, dan BP Batam atas Rapat Dengar Pendapat hari ini.

Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan hari ini bisa kita perjuangkan pada pembahasan di Banggar yang akan dilakukan minggu depan. Mudah-mudahan sebagian daripada cita-cita Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk meningkatkan anggaran yang bisa tercapai. Kalaupun belum, sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan DPR tadi, *bismillah Insya Allah* setelah Pak Prabowo dilantik.

Baik, dengan ini rapat kami tutup.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.05 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001